

LAPORAN **PP 39**

2023



TRIWULAN IV

KATA PENGANTAR

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Inspektorat Jenderal Triwulan IV Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Jenderal yang telah saling mendukung dan bekerja keras sehingga tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dapat terlaksana dengan baik.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Inspektorat Jenderal, dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal.

Jakarta, 12 Januari 2024

INSPEKTUR JENDERAL

Ttd.

M. RUM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
I.1. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal	1
I.2. Latar Belakang Kegiatan/Program	1
I.3. Struktur Organisasi	2
BAB II. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN.....	10
A . Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2023	10
B. Sasaran Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2023	14
BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN.....	18
III.1. Hasil yang Telah Dicapai	18
III.2. Analisa Capaian Kinerja.....	21
III.3. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan.....	36
III.4. Langkah Tindak Lanjut.....	37
BAB IV. PENUTUP.....	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Program Inspektorat Jenderal.....	12
Tabel 2 Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal.....	14
Tabel 3 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2023.....	15
Tabel 4 Realisasi Keuangan Inspektorat Jenderal Triwulan IV Tahun 2023.....	19
Tabel 5 Realisasi Anggaran Berdasarkan data SPAN 31 Desember 2023.....	20
Tabel 6 Progres Capaian Renstra Inspektorat Jenderal TW IV 2023	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal	2
Gambar 2 Bagan Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal.....	4
Gambar 3 Bagan Organisasi Inspektorat I.....	5
Gambar 4 Bagan Organisasi Inspektorat II	7
Gambar 5 Bagan Organisasi Inspektorat III.....	8
Gambar 6 Bagan Organisasi Inspektorat IV	9

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

I.2. Latar Belakang Kegiatan/Program

Agar fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program/kegiatan tahun 2023 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal ditujukan untuk mendukung kelancaran administrasi dan manajemen pengawasan untuk mewujudkan upaya:

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, di mana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi *Post Audit*, tetapi juga

sebagai *Consulting Partner* (mitra konsultasi) dan sebagai *Quality Assurance* (penjamin mutu) kegiatan unit kerja.

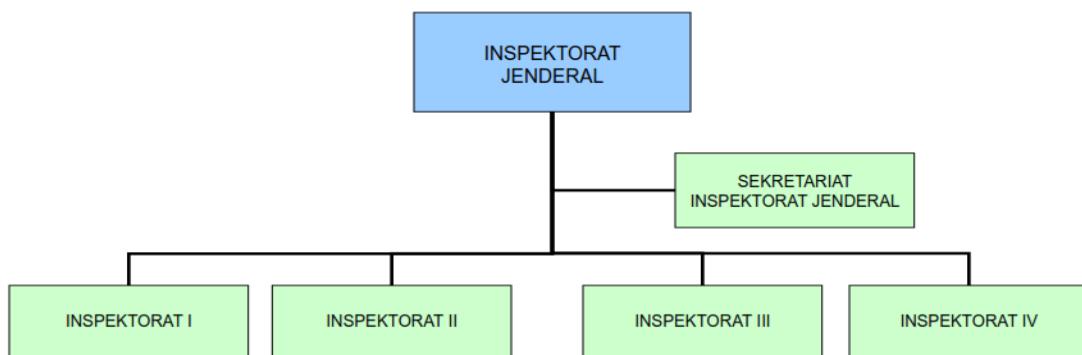
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

I.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian pasal 192, susunan organisasi Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- Inspektorat I;
- Inspektorat II;
- Inspektorat III; dan
- Inspektorat IV.

Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Inspektorat Jenderal;
- b) Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang pengawasan intern;
- c) Penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- d) Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama Inspektorat Jenderal;
- e) Penyiapan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan masyarakat Inspektorat Jenderal;
- f) Penyiapan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemeriksaan ekstern, pengelolaan, analisis, dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern, serta evaluasi hasil pengawasan;
- g) Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan Inspektorat Jenderal;
- h) pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana Inspektorat Jenderal; dan
- i) pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, rumah tangga, barang milik negara, dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.

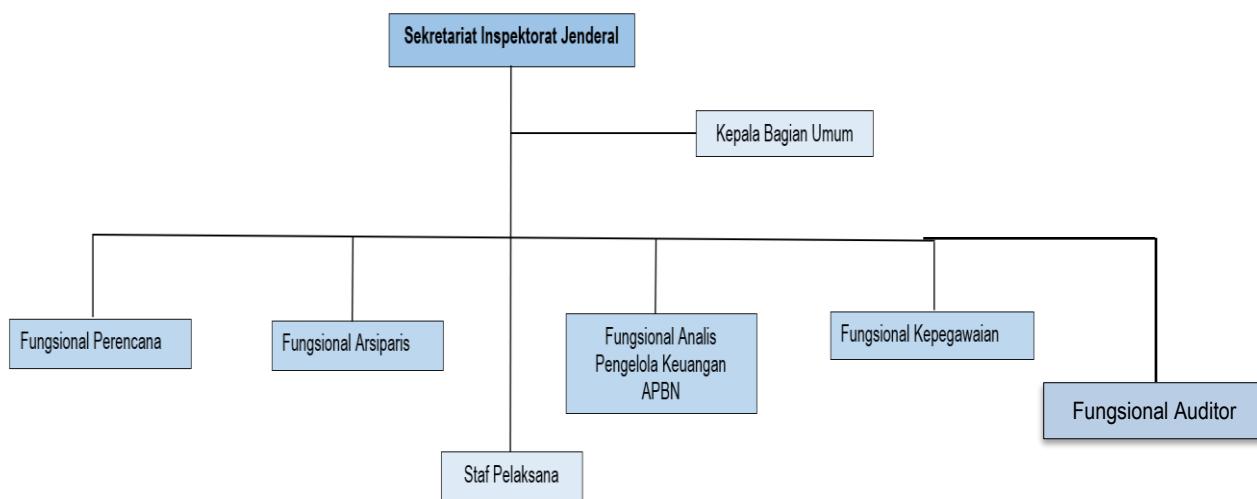
Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas :

- a. Bagian umum; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, rumah tangga, barang milik negara, serta manajemen kinerja Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan Inspektorat Jenderal;
- Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan rumah tangga Inspektorat Jenderal;
- Pengelolaan barang milik negara Inspektorat Jenderal; dan
- Pelaksanaan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.



Gambar 2 Bagan Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal

1) Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri. Dalam melaksanakan

tugas dimaksud, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- b) Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c) Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d) Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e) Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat I.

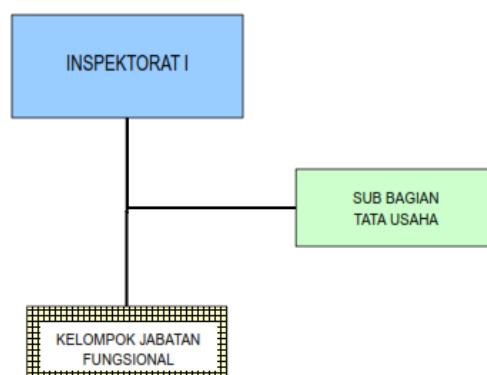
Inspektorat I terdiri dari:

1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat I.

2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Organisasi Inspektorat I adalah sebagai berikut :



Gambar 3 Bagan Organisasi Inspektorat I

2) Inspektorat II

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- b) Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c) Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d) Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e) Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat II.

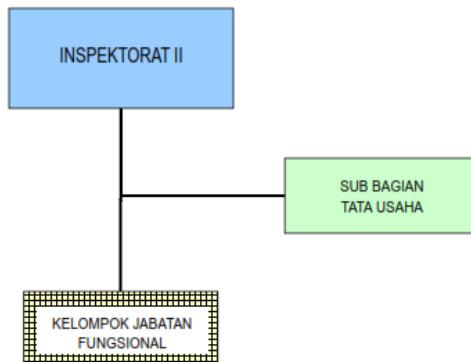
Inspektorat II terdiri dari :

1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat II.

2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan organisasi Inspektorat II adalah sebagai berikut :



Gambar 4 Bagan Organisasi Inspektorat II

3) **Inspektorat III**

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi, dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- b) Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c) Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d) Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e) Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat III.

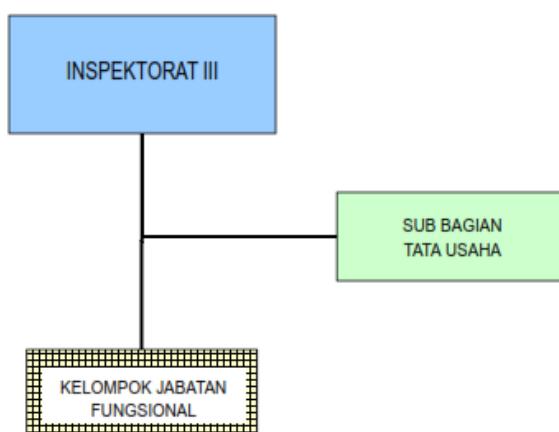
Inspektorat III terdiri dari :

1. Subbagian Tata Usaha;

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat III.

2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan organisasi Inspektorat III adalah sebagai berikut :



Gambar 5 Bagan Organisasi Inspektorat III

4) Inspektorat IV

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayah, dan Akses Industri Internasional, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pusat Pemberdayaan Industri Halal, dan perwakilan Kementerian Perindustrian di luar negeri. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- b) Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan

- keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c) Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
 - d) Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - e) Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat IV.

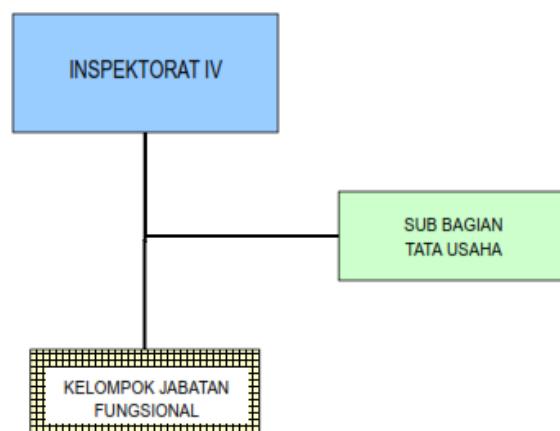
Inspektorat IV terdiri dari :

- 1. Subbagian Tata Usaha;

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat Iv.

- 2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan organisasi Inspektorat IV adalah sebagai berikut :



Gambar 6 Bagan Organisasi Inspektorat IV

BAB II. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

A. Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2023

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa terdapat dua agenda pembangunan yang melibatkan peran penting industri yaitu “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas” dan “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”. Agenda pemerintah ini dapat dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan akan dilakukan Kementerian Perindustrian yang tertuang pada Renstra Kemenperin 2020-2024, salah satunya adalah kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri dan Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian mengemban tugas untuk melaksanakan "Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian". Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian telah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pengawasan sebagai berikut:

1. Visi

Visi Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian mempunyai visi yang sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu "*Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*".

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, Inspektorat Jenderal mengemban misi yang sama dengan Kementerian Perindustrian maupun Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

3. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Inspektorat Jenderal selaras dengan tujuan Kementerian Perindustrian, yaitu *“Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional”* yang bercirikan:

- 1) Mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- 2) Mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- 3) Mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian mengembangkan tugas untuk melaksanakan "Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian", dengan kegiatan pada Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 1 Program Inspektorat Jenderal

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET
1	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat I - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat I - Layanan Audit Internal dan pada satker cakupan tugas Inspektorat I 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Laporan - 5 Laporan - 185 Laporan
2	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat II - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat II - Layanan Audit Internal dan pada satker cakupan tugas Inspektorat II 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Laporan - 5 Laporan - 20 Laporan
3	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat III - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat III - Layanan Audit Internal dan pada satker cakupan tugas Inspektorat III 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Laporan 5 Laporan - 115 Laporan
4	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat IV - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat IV - Layanan Audit Internal dan pada satker cakupan tugas Inspektorat IV 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Dokumen - 5 Dokumen - 30 Laporan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET
5	Pengelolaan Manajemen Keseretariatan Bidang Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Perangkat TIK - Layanan Hukum - Layanan Hubungan Masyarakat - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal - Layanan Umum - Layanan Perkantoran - Layanan Sarana Internal - Layanan Manajemen SDM - Layanan Perencanaan dan Penganggaran - Layanan Pemantauan dan Evaluasi - Layanan Manajemen Keuangan - Layanan Audit Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Unit - 2 Layanan - 3 Layanan - 6 Layanan -1 Layanan - 12 Layanan -1 Unit -105 Pegawai - 1 Dokumen -10 Dokumen - 12 Dokumen - 1 Dokumen

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian dapat tercapai targetnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang selama Tahun 2023 dianggarkan dengan pagu sebesar Rp43.989.630.000,00. Pada Triwulan IV ini, tepatnya pada tanggal 23 Oktober 2023 pagu anggaran menjadi Rp 39.111.629.000,00 karena adanya pengembalian dana blokir *Auto Adjustment*.

B. Sasaran Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2023

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai ukuran keberhasilan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal

No	Tujuan	Penjelasan Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target
1	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional	Mendukung tercapainya tujuan Kementerian Perindustrian melalui pengawasan Internal yang efektif dan efisien	Nilai RB area penguatan pengawasan Kementerian Perindustrian	Nilai RB khusus untuk area penguatan pengawasan berdasarkan hasil PMPRB	Percentase	73%
			Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	Indeks penerapan MRI Kementerian Perindustrian		Indeks 2,89
			Level kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Terwujudnya level IACM Kementerian Perindustrian melalui <i>self assessment</i> atau penilaian dari BPKP	Nilai	3,05

Dalam mewujudkan tujuan Inspektorat Jenderal, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Perspektif Pemangku Kepentingan dan Proses Bisnis Internal yang diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2023

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE				
1. Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	1.1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	1,2 %	Menghitung jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah <1,2% total anggaran Kementerian Perindustrian	
	1.2 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	95%	Jumlah total aduan yang telah masuk ke sistem Dumas dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan yang telah masuk ke dalam sistem Dumas	
	1.3 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	92%	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasI	
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	2.1 Nilai RB area penguatan pengawasan	73%	Nilai pada area penguatan pengawasan dibandingkan total nilai dalam penilaian Reformasi Birokrasi	
	2.2 Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	2,89	Hasil penilaian Indeks Manajemen Risiko berdasarkan Evaluasi BPKP terhadap Kementerian Perindustrian	
BUSINESS INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
3.	3.1 Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	80%	Melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan alat bantu kuesioner,Capaian masing-masing Inspektorat diambil berdasarkan nilai unit kerja yang menjadi cakupan	

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	3.2 Capaian IACM Inspektorat Jenderal	3,05	Hasil penilaian Level IACM oleh BPKP terhadap Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	4.1 Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal *)IKU	85%	<p>Realisasi Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri di Inspektorat Jenderal (RP3DN)= $\frac{RAP3DN}{TotAP3DN}$</p> <p>Keterangan:</p> <p>RAP3DN = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk Dalam Negeri (DN)</p> <p>TotAP3DN = Total pagu anggaran P3DN berdasarkan akun yang telah disepakati yaitu, 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111</p>
5.	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	5.1 Efektivitas Regulasi yang ditetapkan di Lingkungan Inspektorat Jenderal	78%	<p>Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal didapatkan dari hasil monev melalui perhitungan yang dilakukan oleh masing-masing unit eselon I dengan melihat dari regulasi yang dijadikan sampel, apakah regulasi tersebut telah sesuai atau dapat mencapai target/tujuan dari regulasi tersebut di susun. Pengukuran efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin di hitung secara proporsional, dengan rumus:</p> $Er = \frac{SRe}{Ts}$ <p>Ket: Er = Nilai Efektivitas Regulasi SRe = Jumlah Sampel Regulasi yang tercapai tujuannya Ts = Jumlah Total Regulasi yang dijadikan sampel perhitungan Jumlah penyesuaian pedoman /prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang</p>

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
				berlaku, dihitung dari jumlah program penyusunan yang dibuat
6.	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	6.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78,6	Perhitungan nilai SAKIP Inspektorat Jenderal menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 88 tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim Auditor Inspektorat Jenderal
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE				
7.	Terwujudnya APIP yang Profesional dan Berintegritas	7.1 Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	71	Perhitungan indeks merujuk pada peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut: a. 91-100 (sangat tinggi); b. 81-90 (tinggi); c. 71-80 (sedang); 61-70 (Rendah); e. 60 ke bawah (sangat rendah).

Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan tersebut dirinci dalam rencana aksi setiap triwulan, rencana aksi Inspektorat Jenderal Tahun 2023 terlampir pada dokumen ini.

BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

III.1. Hasil yang Telah Dicapai

Hingga Triwulan IV Tahun 2023 Inspektorat Jenderal telah melakukan revisi DIPA sebanyak tiga belas (13) kali dalam rangka mengakomodir kebutuhan kegiatan pengawasan dan dukungan pengawasan Inspektorat Jenderal ke Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, revisi terakhir pada tahun ini merubah pagu awal dari sebesar Rp43.989.630.000,00 menjadi Rp39.111.629.000,00 Kegiatan Inspektorat Jendral pada triwulan IV ini mayoritas merupakan penyelesaian kegiatan yang telah terlaksana dengan baik.

Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian hingga Triwulan IV Tahun 2023 (Januari – Desember) mencapai Rp38.732.957.962,00 atau 99,03% dari total pagu anggaran Rp39.111.629.000,00.

Tabel berikut menggambarkan pagu anggaran dan realisasi per unit eselon II sampai dengan TW IV tahun 2023 :

Tabel 4 Realisasi Keuangan Inspektorat Jenderal Triwulan IV Tahun 2023

Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi hingga Triwulan IV		Jumlah di Blok/Revisi	Outstanding Kontrak	Dana Tersedia
		Keuangan (Rp.)	%			Jumlah (Rp.)
Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	2.100.000.000	2.099.943.413	100	0	0	56.587
Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	2.000.000.000	1.985.344.179	99,27	0	0	14.655.821
Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III	2.100.000.000	2.094.283.104	99,73	0	0	5.716.896
Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV	2.000.000.000	1.988.748.266	99,94	0	0	1.251.734
Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal	30.911.629.000	30.554.639.000	98,85	0	0	356.990.000
T O T A L	39.111.629.000	38.732.957.962	99,03	0	0	378.671.038

Adapun realisasi anggaran per jenis belanja dilaporkan sebagai berikut:

Tabel 5 Realisasi Anggaran Berdasarkan data SPAN 31 Desember 2023

No	Kode Nama Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%	Outstanding Kontrak	Jumlah Diblok/Direvisi	Dana Tersedia
1	51 Belanja Pegawai	17.150.698.000	16.808.884.194	98,01	0	0	341.813.806
2	52 Belanja Barang	21.277.931.000	21.241.078.268	99,83	0	0	36.852.732
3	53 Belanja Modal	683.000.000	682.995.500	100	0	0	4.500
Jumlah		39.111.629.000	38.732.957.962	99,03	0	0	378.671.038
<i>Disclaimer: Realisasi berbasis aktual dan bersifat bruto</i>							

Anggaran tersebut telah dimanfaatkan dengan cukup optimal, adapun hasil dari kegiatan yang telah dilakukan hingga triwulan IV ini dapat tercermin pada capaian kinerja inspektorat Jenderal sekaligus progres capaian dari Rencana Strategis Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV diinformasikan pada bagian analisa capaian kinerja.

III.2. Analisa Capaian Kinerja

Tabel 6 Progres Capaian Renstra Inspektorat Jenderal TW IV 2023

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi TW IV	Keterangan
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	1. Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU 2. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti 3. Rekomendasi hasil pengawasan internal tahun 2022 yang ditindaklanjuti oleh satker *IKU	1,2% 95% 92%	Capaian Batas Toleransi temuan material eksternal dhitung dari temuan BPK LK TA 2022 sebesar Rp 964.547.921,86 / realisasi belanja kemenperin TA 2022 sebesar Rp 2.585.079.021.410,00 = 0,0373% Pada Triwulan IV ini, berdasarkan Nota Dinas 30/IJ-IND.1/I/2024 sejak 1 Oktober sampai 31 Desember 2023 dengan jumlah 38 pengaduan yang semuanya tidak berkadar pengawasan. Maka persentase realisasi hingga Desember 2023 ini 100% Rekomendasi hasil pengawasan internal tahun 2022 yang ditindaklanjuti oleh satker hingga 31 Desember 2023 sebesar 98,33% dengan total rekomendasi 1257. Tindak Lanjut sesuai rekomendasi sebanyak 1151, belum sesuai rekomendasi sebanyak 116 dan belum ditindaklanjuti sebanyak 21. Target telah tercapai 98,33% .	  
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1. Nilai RB area penguatan pengawasan	73%	Berdasarkan Keputusan MenpanRB No 739/2023 & PermenpanRB No.9/2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, tidak menghasilkan nilai, hanya berupa laporan hasil evaluasi	

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi TW IV	Keterangan
		2. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	2,89	Berdasarkan Surat BPKP No. PE.09.03/LHP-173/D104/1/2023 tertanggal 8 November 2023, Nilai MRI Kemenperin Tahun 2023 sudah mencapai 3,445	
S3. Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif		1. Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	80%	Inspektorat I: 93,25% (hingga Desember 2023) Inspektorat II: 88,44% Inspektorat III: 89,07% Inspektorat IV: 84,72% (hingga Desember 2023) Maka realisasi nya menjadi 88,87%	
		2. Capaian IACM Inspektorat Jenderal	3,05	Berdasarkan Surat BPKP No. PE.09.03/S-874/D1/04/2023 tertanggal 31 Oktober 2023, Nilai Kapabilitas IACM Itjen Tahun 2023 mencapai 3,00 . (tidak mencapai target)	
		3. Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	79%	Inspektorat I: 100% Inspektorat II: 93,25% Inspektorat III: 100% Inspektorat IV: 100% Maka realisasi pada Triwulan IV ini sebesar 98,3%	
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	1. Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat Jenderal *)IKU	85%	Pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan produk dalam negeri pada Triwulan IV. Berikut adalah realisasi PDN dibagi dengan Pagu anggaran $8.319.456.764 / 8.483.676.000 = 98,06\%$	
5.	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	1. Efektivitas Regulasi bidang industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	78%	Berdasarkan hasil survey, Nilai indeks efektivitas regulasi Peraturan Inspektur Jenderal No. 117/2022 tentang Pedoman penjenjangan dan kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan Itjen yaitu 78,25%	

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi TW IV	Keterangan
6.	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78,6	Pada bulan Mei telah dilakukan Penilaian Dokumen SAKIP Eselon I, dengan nilai BB, atau 70,30	
7.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien	1. Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Tahunan dengan PKPT	100%	Inspektorat I: 96% Inspektorat II : 100% Inspektorat III: 100% Inspektorat IV: 100% Maka Realisasi pada Triwulan IV ini sebesar 99%	
		2. Tingkat Kesesuaian Penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	Inspektorat I: 80% Inspektorat II: 100% Inspektorat III: 100% Inspektorat IV: 100% Maka Realisasi pada Triwulan IV ini sebesar 95%	
		3. Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	74%	Survey kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal pada semester II telah dilaksanakan dengan jumlah 22 orang responden dari 126 orang pegawai. Maka hasil yang diperoleh 80%	
		4. Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Itjen	94%	Berdasarkan Keputusan MenpanRB No 739/2023 & PermenpanRB No.9/2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, tidak menghasilkan nilai, hanya berupa laporan hasil evaluasi. Maka penilaian ini tidak dilakukan.	

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi TW IV	Keterangan
		5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	76	Berdasarkan <i>Online Monitoring</i> , Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) hingga Triwulan IV Tahun 2023 sebesar 96,47 .	
8.	Terwujudnya APIP yang Profesional dan Berintegritas	1. Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	71	Perhitungan Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal Tahun 2023 yaitu 73,12	
		2. <i>Sharing Knowledge</i> atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	70%	Hasil <i>sharing knowledge</i> / pelatihan di kantor sendiri (PKS) selama tahun 2023 yaitu terdapat 13 diklat substansi pengawasan yang dilakukan PKS dari total 17 diklat yang telah diikuti pegawai, maka realisasi sebesar 76%	
		3. Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	77%	Persentase pelaksanaan diklat selama tahun 2023 yaitu 89% dengan rincian 95 orang pegawai yang mengikuti diklat dari 107 pegawai di tahun 2023	

Keterangan :



: Telah tercapai



: Dalam proses pelaksanaan



: Tidak tercapai

Berdasarkan hasil capaian yang diperoleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV tahun 2023, beberapa indikator kinerja yang telah selesai dilaksanakan dan capaiannya sudah terlihat. Namun terdapat tiga indikator kinerja yang tidak tercapai. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada bulan Oktober hingga Desember 2023 di lingkungan Inspektorat Jenderal sebagai berikut.

1. Kegiatan Pengawasan dan Pengawalan

a. Inspektorat I

- 1) Reviu Perencanaan Kebutuhan BMN TA 2025 pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal;
- 2) Audit Kinerja dan Pengelolaan Keuangan/Barang Milik Negara pada BPSDMI TA 2023;
- 3) Reviu Revisi Anggaran BA Bun pada BPSDMI;
- 4) Pengawasan Pembangunan Gedung Politeknik Industri Petrokimia Cilegon untuk pembayaran Termin II;
- 5) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit pada BDI Denpasar;
- 6) Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Madya di Lingkungan APIP secara *e-learning*;
- 7) Reviu Revisi Tambahan Anggaran pada BPSDMI;
- 8) Pengawasan Pembangunan Gedung SMK SMAK Bogor;
- 9) Reviu usulan revisi anggaran pergeseran operasional antar satuan kerja BPSDMI;
- 10) Pendampingan Implementasi Manajemen Risiko pada SMK SMTI Padang;
- 11) Pengawalan Pembangunan Gedung IMC Plered Purwakarta;
- 12) Reviu usulan Revisi DIPA pada Sekretariat Jenderal.
- 13) Kegiatan Pemantauan P3DN;
- 14) Sosialisasi Pelaksanaan Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Pengolahan Kayu TA 2024;
- 15) Koordinasi Evaluasi Program dan Kinerja TA 2023 serta Penajaman Program dan Anggaran TA 2024 Direktorat ASDIPI;

- 16) Finalisasi Pedoman Audit Kinerja pada BPSDMI TA 2023;
- 17) Reviu Usulan Revisi Anggaran Pergeseran Operasional Antar Satuan Kerja BPSDMI;
- 18) Pelatihan Teknis Substantif Audit PNBP di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kemenperin Jakarta;
- 19) Pendampingan Kegiatan Diklat 3 in 1 dan Wirausaha Baru pada BDI Medan.
- 20) Audit Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Struktur Gedung Pendidikan Politeknik Industri Petrokimia Banten.

b. Inspektorat II

- 1) Tindak Lanjut dan Monitoring Pelaksanaan Program Dana Dekonsentrasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara TA 2023;
- 2) Melaksanakan Pendampingan Kegiatan Bimbingan Teknis WUB IKM di Jawa Tengah;
- 3) Survey Lapangan Monitoring dan Evaluasi P3DN Sektor ILMATE di CV. Solo Tehnik;
- 4) Survey Lapangan Monitoring dan Evaluasi P3DN Sektor ILMATE di PT. New Indobatt Energy Nusantara;
- 5) Survey Lapangan Monitoring dan Evaluasi P3DN Sektor ILMATE di PT. LG Electonics Indonesia;
- 6) Survey Lapangan Monitoring dan Evaluasi P3DN Sektor ILMATE di PT. Ebara Indonesia;
- 7) Pengawalan Kegiatan Bimbingan Teknis dan Kewirausahaan Bagi Calon Wirausaha Baru di Kabupaten Tasikmalaya;
- 8) Melaksanakan Pendampingan Kegiatan Bimbingan Teknis WUB IKM di Kabupaten Cirebon dan Indramayu;
- 9) FGD Perumusan dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) serta Persiapan Pelaksanaan Evaluasi RB di Kementerian Perindustrian.
- 10) Pendampingan Kegiatan Bimbingan Teknis WUB IKM;

- 11)Survey Lapangan Monitoring dan Evaluasi P3DN Sektor ILMATE;
- 12)Pengawalan Bimbingan Teknis WUB IKM LMEA, Bimtek IKM IA & KSK dan Bimbingan Teknis WUB IKM PFBB di Provinsi Jawa Barat;
- 13)Audit Hibah Luar Negeri MITDC (*Machine Tools Industry Development Center*) di Institut Teknologi Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 14)Cek Fisik dalam Rangka Audit Kinerja Ditjen IKMA TA 2023 pada Kegiatan Fasilitasi Mesin/Peralatan Bagi IKM Bahan Bangunan Genteng di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;
- 15)Cek Fisik dalam Rangka Audit Kinerja Ditjen IKMA TA 2023 pada Kegiatan Fasilitasi Mesin/Peralatan di Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
- 16)Koordinasi Pengawasan pada Disperindag Provinsi Jawa Barat;
- 17)Cek Fisik dalam Rangka Audit Kinerja Ditjen IKMA TA 2023 pada:
 - a. Kegiatan Fasilitasi Mesin/Peralatan di Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
 - b. Kegiatan Fasilitasi Mesin/Peralatan Bagi IKM Kopi di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB);
 - c. Kegiatan Penumbuhan Calon Wirausaha Baru (WUB) IKM Olahan Pangan di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - d. Kegiatan Fasilitasi Mesin/Peralatan AIO PC untuk Pondok Pesantren (Ponpes) Al Qodiriyah Magelang, Provinsi Jawa Tengah;

- e. Kegiatan Fasilitasi Mesin/Peralatan Pengolahan Kopi di Ponpes Bustanul Ulum Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur;
 - f. Kegiatan Restrukturisasi Mesin dan Peralatan di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
- 18) Monitoring Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Dana Dekonsentrasi pada Disperindagkop UKM Provinsi DKI Jakarta TA 2023;
- 19) Koordinasi Pengawasan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten;
- 20) Cek Fisik dalam Rangka Audit Kinerja Ditjen IKMA TA 2023 ke Provinsi Jawa Barat;
- 21) Pengumpulan Data Tambahan Monitoring dan Evaluasi DAK Bidang Industri Periode 2018 - 2020 di Bandung, Jawa Barat.

c. Inspektorat III

- 1) Pengawalan Pelaksanaan Kegiatan pada BBSPJIA Bogor;
- 2) Pemuktahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal pada BSPJI Ambon;
- 3) Verifikasi BMN Bangunan Air dan Gedung Bangunan pada BSPJI Samarinda;
- 4) Pemuktahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal pada BSPJI Lampung;
- 5) Pemuktahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal pada BSPJPPI;
- 6) Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada PT. Zebra Asaba Industri;
- 7) Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada PT. Plaza Pendidikan Indonesia.
- 8) Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;

- 9) Uji Petik Lapangan dalam Rangka Audit Kinerja BSKJI Tahun 2023;
- 10) Pelatihan Teknis Substantif Audit PNBP di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kemenperin.
- 11) Business Gathering BBSPJPPI 2023 dan mendampingi Inspektur Jenderal dalam Melaksanakan Kunjungan ke Semarang, Kendal, dan Batang.

d. Inspektorat IV

- 1) *Focus Group Discussion (FGD)* Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Kelola Sertifikasi TKDN;
- 2) Survey Lapangan dalam rangka Audit Kinerja pada Ditjen IKFT TA 2022;
- 3) FGD Pembahasan Revisi Permenperin Nomor 18 Tahun 2021;
- 4) Verifikasi Lapangan Tahap VI Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Pengolahan Kayu;
- 5) Survey Lapangan dalam rangka Audit Kinerja pada Ditjen IKFT TA 2022 Tahap Kedua;
- 6) FGD Perumusan dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta Persiapan Pelaksanaan Evaluasi RB di Kementerian Perindustrian;
- 7) FGD Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Kelola Sertifikasi TKDN;
- 8) Survei Lapangan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi P3DN;
- 9) Rapat Tim Teknis Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Pengolahan Kayu TA 2023;
- 10) Survey Lapangan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi P3DN;
- 11) Pendampingan Verifikasi NK Sektor Kimia Hulu oleh LVI;

- 12) Pendampingan Verifikasi Rencana Pasokan Bahan Baku Plastik *High Impact Polystyrene and General Purpose Polystyrene*;
- 13) Pengawalan Inspeksi Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Buang Sektor Industri;
- 14) Koordinasi Evaluasi Program dan Kinerja TA 2023 serta Penajaman Program dan Anggaran TA 2024 Direktorat ASDIPI;
- 15) Cek Fisik dalam rangka Audit Program dan Kegiatan pada PPIH TA 2022;
- 16) Koordinasi Pembangunan Industri Petrokimia di Papua Barat;
- 17) Pemantauan Pemanfaatan Output Pekerjaan Penerapan Teknologi Industri 4.0 pada Mesin dan Peralatan Pusat Pengembangan Kompetensi Industri Pengolahan Kakao Terpadu (TA 2019).
- 18) Cek Fisik Audit Program dan Kegiatan PPIH TA 2022 dan Pemantauan Pemanfaatan Output Pekerjaan Penerapan Teknologi Industri 4.0 pada Mesin dan Peralatan Pusat Pengembangan Kompetensi Industri Pengolahan Kakao Terpadu (TA 2019);
- 19) Cek Fisik dalam rangka Audit Program dan Kegiatan pada PPIH TA 2022;
- 20) Cek Fisik dalam rangka Audit Program dan Kegiatan pada Pusat P3DN;
- 21) Pemantauan Pemanfaatan Output Pekerjaan Penerapan Teknologi Industri 4.0 pada Mesin dan Peralatan Pusat Pengembangan Kompetensi Industri Pengolahan Kakao Terpadu (TA 2019);
- 22) Cek Fisik dalam rangka Audit Program dan Kegiatan pada Pusat P3DN;

- 23) Rapat FGD Pengelolaan dan Peluang Investasi di Kawasan Industri Kemingking Way Pisang, Pesawaran, Bangkalan, Batanjung dan Sumbawa Barat;
- 24) Partisipasi dalam Audiensi dan Temu Usaha Sektor Industri Kimia Hulu;
- 25) Pelaksanaan Program Pendampingan Teknis Implementasi Industri Hijau;
- 26) Pendampingan Kunjungan dalam rangka Penyusunan *Database Supply-Demand* Tahun 2024;
- 27) Rapat Koordinasi "Outlook Kinerja Sektor Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam Tahun 2024";
- 28) Pembahasan Laporan Akhir Pengembangan Sistem Indonesia *Smart Textile Industry Hub* dan Verifikasi Industri Alas Kaki TA 2023.

2. Kegiatan Dukungan Pengawasan

Kegiatan dukungan pengawasan yang dilaksanakan pada bulan Oktober – Desember 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Rapat pembahasan rencana kerja Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2024;
- 2) Penelitian RKA-KL Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2024 oleh Biro Perencanaan;
- 3) Reviu RKA-KL Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2024 beserta Tindak Lanjut dari Hasil reviu RKA-KL Pagu Alokasi oleh APIP;
- 4) Penelaahaan RKA-KL Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2024 bersama mitra DJA Kementerian Keuangan;
- 5) Rapat Pembahasan PKPT Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2024;
- 6) Revisi DIPA Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2023 dalam rangka penyelesaian Blokir AA non Relaksasi Non Belanja Pegawai dari *Automatic Adjustment* Belanja K/L TA 2023;

- 7) Sosialisasi penyelesaian RKA-KL Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2024;
- 8) *Inputting* Data Hasil Pengawasan Internal ke dalam Aplikasi SIMONTIN;
- 9) Penelaahan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal, Menetapkan Status Sementara, dan Inputting Data Hasil Telaahan kedalam Aplikasi Tindak Lanjut;
- 10) Rapat Penyusunan Kebijakan Pengawasan Tahun 2024;
- 11) Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) Inspektorat Jenderal 2023-2024;
- 12) Pembahasan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal Ditjen KPAII;
- 13) Persiapan Evaluasi SPIP oleh BPKP;
- 14) FGD Perumusan dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta Evaluasi RB;
- 15) Finalisasi Rencana Aksi RB General dan Tematik di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- 16) Temu Teknis Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal pada Ditjen IKMA, Ditjen ILMATE, Ditjen IKFT, Ditjen KPAII, Pusdatin, BSKJI, BPSDMI, Setjen, Pusat P3DN, Ditjen IA, Inspektorat Jenderal;
- 17) Pembahasan Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
- 18) Rapat Permintaan Dokumen BPK dan Konfirmasi Kegiatan bersama dengan BPK;
- 19) FGD Tindak Lanjut hasil pemeriksaan BPK di lingkungan BPSDMI;
- 20) Persiapan Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi;
- 21) Koordinasi Pembinaan Jabatan Fungsional;
- 22) Diklat Penjenjangan Auditor Muda 10 orang Arantxa, Noer Kristia, Dinavita, Yansen, Noa Salfhali, Pratiwi, Paramitha, Ayu Budiarti, Atik Rindarsih, Glory Meynar, Galih Tri Purnomo;
- 23) Penyusunan Draft PAK Integrasi an Alexander Hamongan, Hariadi Amri;

- 24) Persiapan Verifikasi Dokumen PPPK di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- 25) Finalisasi Peta Jabatan Itjen Tahun 2023 bersama Biro OSDM;
- 26) Diklat Audit Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan APIP a.n. Zaky Al Afkar, dan Paramitha Susilo Budi Utari;
- 27) Diklat Penjenjangan Ahli Madya a.n. Tjahyono, Kesumaning Hastuti, Oktaviyanto Jimat Wibowo, Denny Chandra Arifin, Wuryanto, Trinanti Sulamit;
- 28) Diklat Penjenjangan Ahli Muda a.n. Arantxa Tiar, Noer Kristia Lestari Sitepu, Noa Salfhali, Yansen Aditya Sembiring, Atik Rindarsih, Glory Meynar Manjadi Hamongan Sidjabat, Ayu Budiarti, Paramitha Susilo Budi Utari, Galih Tri Purnomo, Dinavita Rizkyanti, Dian Novita Sari;
- 29) Diklat Pemantauan Tindak Lanjut dan Pengelolaan Hasil Pengawasan an Zulva Siti Nurjanah;
- 30) Workshop Pemanfaatan Forensik Digital dan Analis Data bagi APIP K/L an. Safita Ema Amalia;
- 31) Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Fungsional Auditor an. Yon Handika, Gian Adhi Darmawan, Afriyanto Yanuarista Pratomo, Mochammad Iqbal Ardi Wibowo;
- 32) Bimbingan Teknis Angka Kredit dan Pengangkatan JFA dari BPKP;
- 33) Pertanggungjawaban keuangan sampai dengan pencairan dan Penyelesaian laporan perpendaharaan rutin tiap bulan.
- 34) Melaksanakan Reviu Rencana Strategis Inspektorat Jenderal;
- 35) FGD Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) Semester I Tahun 2023;
- 36) *Trilateral Meeting* pagu anggaran Kementerian Perindustrian Tahun anggaran 2024;
- 37) Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR-RI Pagu Anggaran Kementerian Perindustrian Tahun anggaran 2024;
- 38) Rapat Koordinasi Internal Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Inspektorat Jenderal;

- 39)Rapat Pembahasan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Inspektorat Jenderal;
- 40)Rapat Pelaporan Capaian Stranas PK Periode B09 Tahun 2023;
- 41)Persiapan pelaksanaan diklat auditor madya sebanyak 5 orang dan auditor muda 1 orang;
- 42)PKS Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko dan PKS Penyusunan PKPT Berbasis Risiko;
- 43)Penyusunan SK tim kerja dalam rangka Rapat Koordinasi Pengawasan.
- 44)Revisi DIPA ke-12 dalam rangka pemenuhan kekurangan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Kementerian Perindustrian; serta pendanaan pelaksanaan *Capacity Building* Pegawai Inspektorat Jenderal;
- 45)Penyusunan Bahan dan Menghadiri Rapat Capaian Anggaran Kementerian Perindustrian;
- 46)Finalisasi Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2024 dengan mitra Direktorat Jenderal Anggaran;
- 47)Penyusunan Konsep Bahan Paparan terkait Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Kementerian Perindustrian;
- 48)Penyusunan Konsep Revisi DIPA ke-13 dalam rangka memenuhi kekurangan pada belanja operasional dan kegiatan *Capacity Building* pegawai Inspektorat Jenderal;
- 49)Penyusunan Konsep awal narasi PKPT Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2024 Revisi DIPA Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2023 dalam rangka penyelesaian Blokir AA non Relaksasi Non Belanja Pegawai dari *Automatic Adjustment* (AA) Belanja K/L TA 2023;
- 50)Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2023 pada bulan November;
- 51)Revisi Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2023;

- 52)Rapat Reviu Renstra terkait indikator Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal oleh Satker dan Penerapan TABK;
- 53)Koordinasi Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik melalui SP4N LAPOR!;
- 54)Penyusunan Kebijakan Pengawasan Tahun 2024;
- 55)Persiapan Surat Saldo Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- 56)Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Muda dan Ahli Madya di Lingkungan APIP;
- 57)Ujian Sertifikasi Auditor Berbasis Komputer (USABK);
- 58)Pelatihan Teknis Substantif Audit PNBP di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kemenperin;
- 59)Pertanggungjawaban keuangan sampai dengan pencairan dan Penyelesaian laporan perpendaharaan rutin tiap bulan.
- 60)Penyiapan Bahan Rapat Kerja Kementerian Perindustrian Pembahasan Review Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- 61)Penyusunan Narasi dan Finalisasi Konsep PKPT Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2024;
- 62)Identifikasi awal Renja Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2025;
- 63)Rapat Reviu Renstra dan Tindak Lanjut SAKIP 2023;
- 64)Penelaahan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal, Menetapkan Status Sementara, dan *Inputting* Data Hasil Telaahan kedalam Aplikasi Tindak Lanjut;
- 65)Rapat Pelaporan Capaian Strategi Nasional Aksi Pencegahan Korupsi Triwulan IV Tahun 2023 (Periode B12);
- 66)Pelaksanaan *Area of Improvement* (AoI) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal;
- 67)Penguatan Peran Focal Point dalam Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi di Istora Senayan Jakarta;

- 68) Sosialisasi Hasil Evaluasi RB Kementerian Perindustrian Tahun 2023 dan Persiapan Pelaksanaan Evaluasi *On-Going* Triwulan IV Tahun 2023;
- 69) Sosialisasi Pengelolaan SP4N LAPOR! di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- 70) Koordinasi penggunaan Teammate terkait pelaksanaan audit berupa Aplikasi Sistem Manajemen Audit yang terintegrasi;
- 71) FGD Monitoring dan Evaluasi Produk Dalam Negeri Semester II;
- 72) Pelaksanaan *Capacity Building* untuk seluruh pegawai Inspektorat Jenderal dengan Motivator Merry Riana yang dilaksanakan di Wisma Industri, Puncak Jawa Barat;
- 73) Rapat Evaluasi Indikator Kinerja dengan kesepakatan target IKU Batas Toleransi Temuan Material Eksternal diturunkan dari 1% menjadi 0,8% (Target Minimasi);
- 74) Pelaksanaan survey efektivitas regulasi bidang pengawasan yang ditetapkan di Inspektorat Jenderal dengan topik Peraturan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 117 Tahun 2022 tentang Pedoman Penjenjangan dan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Inspektorat Jenderal;
- 75) Pelaksanaan Survey Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal;
- 76) Pertanggungjawaban keuangan sampai dengan pencairan dan penyelesaian laporan perpendaharaan rutin tiap bulan.

III.3. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Pada Triwulan IV Tahun 2023, dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal tidak mengalami hambatan yang berarti, walaupun revisi anggaran terus dilakukan untuk menyesuaikan kegiatan pengawasan. Namun demikian, terdapat sedikit hambatan pada Inspektorat II, Inspektorat IV yang tertuang dalam laporan PP39, yaitu:

1. Masih terdapat kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan PKPT;
2. Laporan Audit Direktorat Jenderal IKMA belum selesai pada bulan Desember karena banyaknya kegiatan pada direktorat tersebut sehingga

klarifikasi temuan audit dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPPK) dan para penanggungjawab belum dapat terlaksana dan hal ini memengaruhi realisasi fisik;

3. Belum terdapat pedoman audit kinerja di lingkungan Inspektorat IV;
4. Belum terdapat pedoman pelaksanaan dan pelaporan kegiatan monitoring dan evaluasi (program prioritas dan kegiatan berisiko tinggi).

III.4. Langkah Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dalam pelaksanaan kegiatan di Triwulan III ini, maka Inspektorat Jenderal mengupayakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan dan Bagian Program agar realisasi kegiatan/program dan keuangan sesuai dengan dokumen PKPT;
2. Audit pada Ditjen IKMA yang belum selesai ini akan dilaksanakan dan diperpanjang sampai dengan 31 Januari 2024;
3. Akselerasi realisasi program/kegiatan di lingkungan Inspektorat Jenderal agar terlaksana sesuai dengan perencanaan waktu yang ditetapkan pada awal tahun;
4. Berkoordinasi dengan semua pihak terkait melalui berbagai macam media baik *online* maupun secara langsung sehingga pelaksanaan kegiatan pengawasan tetap berjalan dengan lancar sesuai dengan target yang ditetapkan.
5. Koordinator kegiatan agar segera melaksanakan tahapan kegiatan sesuai dengan *timeline* yang telah disusun dengan memperhatikan keterkaitan pelaksanaan antar kegiatan.
6. Diperlukan koordinasi antar tim pada Sekretariat Inspektorat agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar;
7. Dalam rangka meningkatkan capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), maka tim kerja keuangan dan program akan memantau capaian masing-masing indikator secara rutin setiap bulan dan bila memungkinkan akan mengadakan pengisian aplikasi bersama agar data yang dilaporkan sinkron;

8. Inspektorat IV akan menyusun pedoman audit kinerja di lingkungan Inspektorat IV
9. Inspektorat IV akan menyusun pedoman pelaksanaan dan pelaporan kegiatan monitoring dan evaluasi (program prioritas dan kegiatan berisiko tinggi)

BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian selama periode Triwulan IV Tahun 2023 secara umum telah berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan.

Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 (Januari-Desember) mencapai Rp38.732.957.962 atau 99,03 % dari total pagu anggaran sebesar Rp39.111.629.000,00.

Dalam pelaksanaan kegiatan sasaran kinerja dan keluaran masih terdapat empat sasaran kinerja yang belum dapat dicapai walaupun pada triwulan ini merupakan tahapan penyelesaian, namun pekerjaan rutin yang merupakan kegiatan pengawasan dan pelayanan internal tetap dapat dilaksanakan tanpa adanya kendala yang berarti.

Informasi capaian kinerja Triwulan IV ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk evaluasi serta perbaikan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya, agar target kinerja yang akan dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja TA 2024 dapat tercapai pada akhir tahun anggaran.

LAMPIRAN

Bukti Dukung Capaian Indikator Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan barang dan Jasa per 31 Desember 2023 di Inspektorat Jenderal.

Realisasi Belanja PDN, TKDN, dan Impor terhadap Pagu Anggaran

No.	Unit Kerja	Pagu Anggaran	Realisasi PDN	Realisasi TKDN	Realisasi Impor	% Realisasi PDN + TKDN
1.	Sekretariat Jenderal	172.917.718.000	151.511.146.227	9.167.984.300	11.634.618.877	92,92%
2.	Direktorat Jenderal Industri Agro	27.037.432.000	25.918.465.328	267.977.550	16.546.908	96,85%
3.	Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	31.160.669.000	30.651.719.123	49.980.000	160.000	98,53%
4.	Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	27.615.124.000	26.462.464.312	700.391.452	133.621.709	98,36%
5.	Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka	500.227.140.000	480.016.869.361	5.742.256.459	2.090.357.795	97,11%
6.	Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayah dan Akses Industri Internasional	146.445.194.000	51.374.556.341	459.150.000	91.234.654.439	35,39%
7.	Inspektorat Jenderal	8.483.676.000	7.890.956.764	428.500.000	0	98,06%
8.	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	172.679.715.000	97.932.735.436	24.396.761.756	34.597.997.122	70,84%
9.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	362.366.073.000	208.981.797.952	84.736.131.759	3.495.464.609	81,06%
Total		1.448.932.741.000	1.080.740.710.844	125.949.133.276	143.203.421.459	83,28%

Bukti Dukung Capaian Indikator Rekomendasi Hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker

NO.	Satker	Jml Temuan	Nilai (Rp)	Jml Tindak Lanjut	Nilai (Rp) yang telah ditindaklanjuti	Saldo Temuan	Nilai (Rp) yang belum ditindak lanjuti	Total Rekomendasi	Sesuai Rekomendasi	Belum Sesuai Rekomendasi	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti
1	Pusat	363	Rp 445.681.511,61	284	Rp 432.001.308,61	79	Rp 13.680.203,00	549	462	77	10	0
2	Balai Besar	124	Rp 24.148.531	124	Rp 24.148.531	0	Rp -	165	165	0	0	0
3	Baristand	68	Rp 6.272.832	68	Rp 6.272.832	0	Rp -	93	93	0	0	0
4	Balai Diklat	53	Rp -	53	Rp -	0	Rp -	89	89	0	0	0
5	Sekolah	171	Rp 111.882.683	167	Rp 111.882.683	4	Rp -	276	269	4	3	0
6	Dekonsentrasi	80	Rp -	68	Rp -	12	Rp -	85	73	4	8	0
TOTAL		859	Rp 587.985.557	764	Rp 574.305.354	95	Rp 13.680.203	1257	1151	85	21	0

Capaian Indikator Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker 98,33%

NOTA DINAS

Nomor: 30 /IJ-IND.1/I/2024

Kepada Yth : Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian
D a r i : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Perihal : Laporan Kegiatan Pengaduan Masyarakat
 Periode 1 Oktober s/d 31 Desember Tahun 2023
Tanggal : 4 Januari 2024

Bersama ini kami sampaikan laporan kegiatan Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal tentang Pengaduan Masyarakat untuk periode 1 Oktober s/d 31 Desember Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian No. 20/M-IND/PER/4/2008 Tahun 2008, yang diperbarui dengan Keputusan Menteri Perindustrian No. 134 Tahun 2018. Tugas yang dilaksanakan adalah memberikan layanan konsultasi dan bimbingan teknis kepada unit-unit kerja dan pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Disamping itu, Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal juga ditugaskan untuk menangani dan mengelola administrasi pengaduan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29/M-IND/PER/6/2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Perindustrian dan Peraturan Inspektur Jenderal No. 127/IJ-IND/Per/10/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Masyarakat.

2. Berkenaan dengan penanganan pengaduan masyarakat dapat kami laporan bahwa, selama periode 1 Oktober s/d 31 Desember Tahun 2023, Kementerian Perindustrian telah menerima pengaduan masyarakat berjumlah 38 (tiga puluh delapan) kali pengaduan, yang dilakukan secara *online*.

Adapun Jenis pengaduan yang diterima dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Penyalahgunaan Wewenang : - aduan (0,00%);
 - b. Pelayanan Masyarakat : 20 aduan (52,63%);
 - c. Indikasi KKN/Pungutan Liar : - aduan (0,00%);
 - d. Kepegawaian : 2 aduan (5,26%);
 - e. Tata Laksana/Regulasi : - aduan (0,00%);
 - f. Perumahan/Pertanahan : - aduan (0,00%);
 - g. Pengaduan Lainnya : 16 aduan (42,11%).
3. Dari 38 (tiga puluh delapan) pengaduan yang masuk pada portal *online* Kementerian Perindustrian terdistribusi pada unit-unit sebagai berikut:

- a. Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika , menerima 7 (tujuh) kali pengaduan (18,42%), yang terdiri dari 1 (satu) pengaduan kepada Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan tentang keluhan sistem sisapira yang bermasalah; dan 6 (enam) pengaduan untuk Direktorat Industri Logam tentang terlambatnya proses penyelesaian rekomendasi impor dan Neraca Komoditas besi baja.
 - b. Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, menerima 1 (satu) pengaduan (2,63%), tentang keluhan pelapor atas sulitnya menghubungi nomor telpon tata usaha pada unit tersebut;
 - c. Direktorat Jenderal Industri Agro, menerima 3 (tiga) pengaduan (7,89%), tentang keterlambatan proses permohonan verifikasi pemenuhan persyaratan 10130, pada Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan yang merupakan pengaduan berulang;
 - d. Direktorat Jenderal Industri Ketahanan Perwilayah dan Akses Industri Internasional, menerima 5 (lima) pengaduan (13,16%) yang terdiri dari 4 (empat) pengaduan untuk Direktorat Perwilayah Industri tentang terlambatnya proses penyelesaian Surat Keterangan Pengecualian Diluar Kawasan, dan 1 (satu) pengaduan untuk Sekretariat Ditjen KPAll tentang informasi pegawai yang sedang menempuh pendidikan.
 - e. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon, menerima 3 (tiga) pengaduan (7,89%), merupakan pengaduan berulang tentang keberatan pengadu terhadap keakuratan hasil uji mutu produk;
 - f. Biro OSDM, menerima 2 (dua) pengaduan (5,26%) tentang keluhan dari peserta seleksi CPNS terkait jadwal yang terlalu mepet dan dari peserta seleksi pegawai PPPK tahun 2023, yang menyampaikan keberatan atas diluluskannya seorang peserta yang diduga tidak memenuhi syarat pada tahap administrasi;
 - g. Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, menerima 2 (dua) pengaduan (5,26%), tentang permintaan klarifikasi terkait proses pengajuan TKDN dan adanya kendala pada situs P3DN;
 - h. Unit Pelayanan Publik, menerima 4 (empat) pengaduan (10,53%), tentang adanya kendala pada pengiriman email dan permintaan informasi lainnya;
 - i. Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu, menerima 1 (satu) pengaduan (2,63%) tentang keluhan mahasiswa terkait alat pendingin ruangan yang kurang berfungsi dengan baik;
 - j. Pengaduan yang materinya tidak relevan dengan Kementerian Perindustrian (diluar kewenangan) terdapat 10 (sepuluh) pengaduan (26,32%).
4. Seluruh jumlah pengaduan yang diterima pada periode laporan ini, sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali adalah tidak berkadar pengawasan, dan telah disampaikan seluruhnya kepada masing-masing unit terkait agar segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Sedangkan pengaduan lainnya telah langsung dijawab sebagaimana mestinya.

(Daftar inventarisasi pelaksanaan kegiatan seperti lampiran).

Demikian laporan kami, atas perkenan Bapak Inspektur Jenderal kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Inspektorat Jenderal,



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "dr." followed by a stylized surname.

Wawas Swathatafrijah

Tembusan:

1. Para Inspektur dilingkungan Itjen;
2. Kepala Biro Humas.



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEGIATAN PENGADUAN MASYARAKAT
PERIODE 1 OKTOBER S/D 31 DESEMBER 2023

INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2023

REKAPITULASI KEGIATAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
PERIODE 1 OKTOBER S/D 31 DESEMBER 2023

NO	JENIS PENGADUAN	JMLH	DAR WAS	TDK DAR WAS	STA TUS	PENERIMA ADUAN										
						ILMATE	IKFT	AGRO	KPAII	BSPJI AMBON	RO OSDM	PUSAT P3DN	UPP	Poltek IF&PK	Ekst	
1	Penyalahgunaan wewenang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pelayanan Masyarakat	20	-	20	Selesai	6	-	3	4	3	-	-	4	-	-	-
3	Indikasi KKN/Pungutan liar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kepegawaian	2	-	2	Selesai	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
5	Tatalaksana/ Regulasi	-	-	-	-i	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Perumahan/ Pertanahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pengaduan Lainnya	16	-	16	Selesai	1	1	-	1	-	-	2	-	1	10	
	Jumlah	38	-	38	Selesai	7	1	3	5	3	2	2	4	1	10	

INSPEKTORAT JENDERAL

DAFTAR PELAKSANAAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PERIODE 1 OKTOBER S/D 31 DESEMBER 2023
SECARA ONLINE

No	Tanggal Pengaduan	Pelapor/ Alamat/ Pekerj	Uraian Pengaduan	Jawaban / Tanggapan	Jenis Pengaduan	Status/ Tanggal
1.	10-10-2023 Pkl. 10:23 WIB	Anonim	Surat Permohonan Klarifikasi Terkait Proses Pengajuan TKDN (Seperti Terlampir)	Sehubungan dengan laporan Sdr yang bukan masalah pengaduan, sebaiknya disampaikan ke Email ppid_pusat@kemenperin.go.id agar selanjutnya dapat ditanggapi oleh unit Pusat P3DN Demikian trmkasih.	Pengaduan Masyarakat Lainnya	Selesai 10-10-2023
2.	10-10-2023 Pkl. 14:25 WIB	Anonim	Kami sudah mengirimkan email UPP_Pusat@kemenperin.go.id tetapi email tersebut tidak dapat terkirim. Alamat email tidak ditemukan. Jika ada balasan mohon kirimkan ke email : kp@twinpan.co. Agar kami dapat login ke akun siinas kami	Terkait laporan Saudara, coba dihubungi kembali ke email upp_pusat@kemenperin.go.id Atau bisa chat ke wa 081319976986 Demikian terima kasih.	Pelayanan Masyarakat	Selesai 11-10-2023
3.	11-10-2023 Pkl. 09:04 WIB	SHOFIYATUL MUHARROMAH	Pengajuan yang telah kami lakukan an PT Magicsoft Technology Indonesia dg ID Berkas no #11219811 masih belum ada kelanjutan dari tanggal 20 Juli 2023. Mohon dikonfirmasi atau beri kami penjelasan yang cukup masuk akal, apa penyebabnya sehingga membuat pengajuan kami tidak ada respon dari bulan Juli 2023. Terimakasih	Laporan pengaduan Sdr. kami teruskan untuk menjadi perhatian agar ditindak lanjuti ke Direktorat Perwilayah Industri Ditjen KPAII. Untuk mendapatkan penjelasannya silahkan hubungi Direktorat Perwilayah Industri Telp. No.5255509/5252741 Pes. 2522 / 4052 Demikian trmkasih.	Pelayanan Masyarakat	Selesai 11-10-2023

No	Tanggal Pengaduan	Pelapor/Alamat/ Pekerja	Uraian Pengaduan	Jawaban / Tanggapan	Jenis Pengaduan	Status/ Tanggal
4.	13-10-2023 Pkl. 14:15 WIB	Oktavianus Yahya putra	Mohon petunjuk permohonan saya #11221218 (SK Pengecualian Berlokasi di Kawasan Industri) mulai 31 agustus sampai 29 september 2023 statusnya Menunggu disposisi Kasubdit - kira kira sampai kapan prosesnya selesai kami sangat membutuhkan SK itu selesai .. mohon informasinya	Laporan Saudara langsung kami sampaikan kepada unit pemroses, yaitu Direktorat Perwilayah Industri, Ditjen KPAII, agar menjadikan perhatian untuk segera ditindaklanjuti. Atau silahkan hubungi Direktorat Perwilayah Industri Telp. No.5255509/5252741 Pes. 2522 / 4052 Demikian, terima kasih.	Pelayanan Masyarakat	Selesai 16-10-2023
5.	17-10-2023 Pkl. 09:47 WIB	Anonim	Nomor Berkas #11213860 Yth. Bapak/Ibu Kasubdit Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan Status berkas dengan nomor diatas sudah 4 hari kerja tidak ada kelanjutannya. Mohon untuk dibantu pengecekannya segera. Terimakasih	Laporan Saudara akan kami segera sampaikan kepada Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan, agar segera ditindaklanjuti, namun sebaiknya narasi laporannya disampaikan secara lengkap seperti : nama perusahaan, nama produk atau materi permohonan yang sedang diajukan agar mudah untuk diidentifikasi. Demikian, terima kasih.	Pelayanan Masyarakat	Selesai 17-10-2023
6.	17-10-2023 Pkl. 21:13 WIB	Anonim	Ada perusahaan namanya PT Totality Jaya Internatioanl, perusahaan ini bergerak di bidang usaha perdagangan Cat Tinta Sablon dan dimana pemasarannya ke pabrik.dengan merk Produk Totality Amanda chem impor dari Vietnam apakah barang Dangan ini sudah terdaftar di kementerian perindustrian dan Perdagangan	Untuk mendapatkan informasi yang diharapkan, terkait dengan laporan Saudara, agar disampaikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang. Demikian, terima kasih.	Pengaduan Masyarakat Lainnya	Selesai 18-10-2023
7.	20-10-2023 Pkl. 10:42 WIB	Yustinus	Sistem Sisapira masih sering error dan menghambat. Contoh: kewajiban mengisikan nama ayah kandung, untuk apa coba? kenapa harus isian Nama, bukan NIK saja. ini case sensitive tidak isiannya? kan jadi gak jelas cross checknya	Berkaitan dengan laporan Saudara, untuk mendapatkan penjelasannya mohon dihubungi email ppid_pusat@kemenperin.go.id atau Dit Ind. Maritim, Alt. Transportasi dan alat pertahanan Ditjen ILMATE 5252693 ext.2322. Demikian trmkasih	Pengaduan Masyarakat Lainnya	Selesai 23-10-2023

No	Tanggal Pengaduan	Pelapor/Alamat/ Pekerj	Uraian Pengaduan	Jawaban / Tanggapan	Jenis Pengaduan	Status/ Tanggal
8.	21-10-2023 Pkl. 08:54 WIB	Erwanto	<p>ndustri skala sedang melakukan aktivitas pekerjaan Senin-Sabtu ,yaitu mesin penggilingan batu kapur,yg membuat lingkungan pemukiman masyarakat sekitar mengeluh krn adanya debu yg tdk baik bt kesehatan ,debu tersebut smp msk kedlm rmh2 pemukiman.</p> <p>Kami cm mau industri tersebut pindah ke tmpt jauh dr pemukiman setempat, krn mrk bbrp thn yg lalu ada beli lahan jauh dr pemukiman tp tdk mau pindah jd smp skrg.</p> <p>Debu batu kapur bnr2 membahayakan kesehatan kl tiap hr trs menerus menghirup debu tersebut</p> <p>Mohon kementerian perindustrian bertindak ksh mrk tenggang waktu untuk pindah dr lingkungan pemukiman setempat itu saja harapan dr masyarakat sekitar padat pemukiaman, terima kasih bnyk.</p>	Memperhatikan laporan Sdr. adalah berkaitan dengan pencemaran lingkungan, maka kami sarankan agar segera dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan/Pemda Kota Medan untuk dapat ditindak lanjuti, Kementerian Perindustrian tidak berwenang menangannya. Demikian trmkasih	Pengaduan Masyarakat Lainnya	Selesai 23-10-2023
9.	23-10-2023 Pkl. 11:52 WIB	Anonim	Terkait dengan email reset password yang belum ada.	<p>Terkait laporan Saudara, coba hubungi ke email upp_pusat@kemenperin.go.id Atau bisa chat ke wa 081319976986 Demikian terima kasih.</p>	Pelayanan Masyarakat	Selesai 23-10-2023
10.	25-10-2023 Pkl. 14:49 WIB	Jabriel Alfarizi	<p>Yth tim kemenperin, Berikut dapat kami sampaikan, mohon bantuannya untuk mengecek permohonan NK Besi Baja PT Joy Global Indonesia yang telah terkirim dan diterima kemenperin sejak 18 Oktober 2023 sampai saat ini statusnya masih menunggu disposisi Kasi, apakah terdapat kendala? sudah coba hubungin ke tim NK dan PIC Siinas belum ada tanggapan sampai saat ini. terimakasih.</p>	Laporan Saudara kami sampaikan kepada unit pemroses yaitu Dit. Industri Logam, Ditjen ILMATE , agar segera ditindaklanjuti. Demikian, terima kasih.	Pelayanan Masyarakat	Selesai 25-10-2023

No	Tanggal Pengaduan	Pelapor/Alamat/ Pekerja	Uraian Pengaduan	Jawaban / Tanggapan	Jenis Pengaduan	Status/ Tanggal
11.	25-10-2023 Pkl. 23:16 WIB	Irvan	saya mengajukan surat keterangan pengecualian diluar kawasan hampir 2 bulan tidak selesai dan sy menghub sdri damayanti via telp tapi tidak diangakat dan menhubungi wa layanan siinas juga tidak di tanggap,i lantas saya ini harus menghubungi siapa lagi	Laporan Saudara kami sampaikan kepada Dit Perwilayah Industri, Ditjen KPAII, agar segera ditindaklanjuti. Demikian, terima kasih.	Pelayanan Masyarakat	Selesai 26-10-2023
12.	26-10-2023 Pkl. 12:08 WIB	Jebriel Al Farizi	Yth tim kemenperin, berikut dapat kami sampaikan kembali, mohon bantuannya untuk mengecek permohonan NK Besi Baja PT Joy Global Indonesia yang telah terkirim dan diterima kemenperin sejak 18 Oktober 2023 sampai saat ini statusnya masih menunggu disposisi Kasi, apakah sudah ada update? mengingat pengajuan untuk permohonan PI Besi Baja APIU ini sudah terpending 5 bulanan. terimakasih.	Laporan Saudara kami sampaikan kepada unit pemroses yaitu Dit. Industri Logam, Ditjen ILMATE , agar segera ditindaklanjuti. Demikian, terima kasih.	Pelayanan Masyarakat	Selesai 26-10-2023
13.	02-11-2023 Pkl. 14:45 WIB	Jebriel Al Farizi	Perusahaan/Instansi: PT Joy Global Indonesia lokasi : Komplek Infinia Park Blok A-1, Jl. DR. Saharjo No. 45, Kel. Manggarai, Kec. Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prop. DKI Jakarta Email : ptjgjgk@gmail.com Pertanyaan: permohonan NK Besi Baja yang telah terkirim dan diterima kemenperin, dari 18 Oktober 2023 sampai saat ini statusnya masih menunggu disposisi Kasi, apakah terdapat kendala? sudah coba hubungin ke tim NK maupun direktorat besi baja tidak ada tanggapan sampai saat ini.	Laporan Saudara telah kami sampaikan kepada Dit Industri Logam, dengan penjelasan dari pihak Dit Ind Logam sbb: "Terkait dengan NK Besi Baja dari PT. Joy Global Indonesia dapat disampaikan bahwa Perusahaan tersebut terdaftar sebagai API-U dimana peraturan pelaksana berupa Peraturan Menteri Perindustrian terkait Impor Bahan Baku dan atau Bahan Penolong oleh Perusahaan yang memiliki nomor induk berusaha yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Umum (API-U) belum	Pelayanan Masyarakat	Selesai 02-11-2023

No	Tanggal Pengaduan	Pelapor/Alamat/ Pekerj	Uraian Pengaduan	Jawaban / Tanggapan	Jenis Pengaduan	Status/ Tanggal
			atau bisa infokan PIC yg bisa dihubungi? mengingat Pic UPP dan yg lainnya tidak ada respon sampai saat ini. regards,	diterbitkan (masih dalam proses penyusunan bersama Biro Hukum), sehingga permohonan perusahaan dimaksud belum bisa diproses". Demikian, terima kasih.		
14.	03-11-2023 Pkl. 08:55 WIB	Anonim	Pada tanggal 3 Novemebr 2023 jam 08.30 WIB saya menghubungi TU Dirjen IKFT di 021-5255509 ext. 4003, sampai 3 kali saya telepon dan diangkat, dan saya sampaikan kendala yang saya hadapi, namun jawab dari seberang telpon \\\"Maaf pak saya anak magang, dan saat ini staf TU tidak ada semua, boleh telepon kembali di hari senin\\\". apa benar hari jum\\'at staf TU Dirjen libur semua?. mohon solusinya.	Sehubungan laporan sdr. hari Jumat staf TU tidak ada yang libur, mungkin ada yang dinas luar atau izin keluar kantor, coba di telp lagi lewat jam 10.00 Demikian kami infokan trmkasih.	Pengaduan Masyarakat Lainnya	Selesai 03-11-2023
15.	03-11-2023 Pkl. 09:58 WIB	Anonim	#11213860 (ID Berkas) Verifikasi Pemenuhan Persyaratan 10130 sejak tanggal 27 Oktober 2023 belum ada kelanjutan lagi proses sudah sampai dimana	Laporan Saudara kami sampaikan kepada unit pemroses yaitu Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan, Ditjen Industri Agro. agar segera ditindaklanjuti. Demikian, terima kasih.	Pelayanan Masyarakat	Selesai 06-11-2023
16.	07-11-2023 Pkl. 14:24 WIB	Jebriel Al Farizi	yth tim kemenperin, RESPON KAMI : mohon dapat diinfokan permohonan ini dapat berjalan??? mengingat proses PI Besi Baja pemiliki APIU ini sudah terpending kurang lebih 8 bulan, sedangkan para mitra sudah sangat menekankan barang yang dipesan untuk menunjang kegiatan industri para mitra. mohon tanggapannya. terimakasih.	Laporan Saudara telah kami sampaikan kepada unit pemroses, kami pengelola pengaduan tidak dapat memberikan tanggapan, kewenangan tindaklanjut berada pada unit pemroses. Demikian, terima kasih.	Pelayanan Masyarakat	Selesai 07-11-2023

No	Tanggal Pengaduan	Pelapor/Alamat/ Pekerj	Uraian Pengaduan	Jawaban / Tanggapan	Jenis Pengaduan	Status/ Tanggal
17.	09-11-2023 Pkl. 08:43 WIB	Ziyaurohman Alladany	Jadwal seleksi CPNS Kemenperin 2023 saya rasa terlalu dekat dan mepet. Pengumuman jadwal seleksi Tanggal 8, dan tanggal 9 saya sudah mendapat jadwal seleksi di lokasi yang bukan domisili saya. Saya tidak punya persiapan waktu untuk izin meninggalkan pekerjaan dan menyiapkan hal-hal lainnya. Saya harap untuk jadwal seleksi dapat dipertimbangkan kembali untuk direvisi jadwalnya.	Laporan Saudara kami teruskan ke Panitia Seleksi CPNS Kemenperin untk menjadi perhatian. Demikian trmkasih.	Kepegawaian	Selesai 09-11-2023
18.	09-11-2023 Pkl. 10:30 WIB	Anonim	Saya PIC dari PT Magicsoft Technology Indonesia Saya sudah pengajuan "SK Pengecualian Berlokasi di Kawasan Industri" dengan nomor ID Berkas #11219811 pada bulan juli 2023 namun tidak ada kelanjutan dari SIINAS, mohon beritahukan kepada kami apa yang menjadi kendala sehingga berhenti di bulan Juli 2023 (tidak ada pergerakan dari pihak SIINAS)	Berkenan dengan laporan Saudara atas pengajuan SK Pengecualian Perusahaan Berlokasi di Kawasan Industri yang belum ada penyelesaiannya sejak bulan Juli 2023, kami sampaikan ke unit pemroses Dit.Perwilayahinan Industri untuk menjadi perhatian segera ditindak lanjuti, agar mendapatkan penjelasan lebih lanjut silahkan melalui email ppid_pusat@kemenperin.go.id atau Direktorat Perwilayahinan Industri Ditjen KPAII Telp. 021 5255509/5252741 ext. 2522 /4052. Demikian trmkasih	Pelayanan Masyarakat	Selesai 09-11-2023
19.	15-11-2023 Pkl. 09:50 WIB	Anonim	#11213860. Untuk Berkas nomor tersebut sejak tanggal 6 november 2023 masih tertahan di verifikasi staf. mengapa lama sekali kerjanya. sedangkan waktu terus berjalan	Laporan Saudara kami sampaikan kembali kepada Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan, Ditjen Industri Agro. untuk segera ditindaklanjuti. Demikian, terima kasih.	Pelayanan Masyarakat	Selesai 15-11-2023

No	Tanggal Pengaduan	Pelapor/Alamat/ Pekerja	Uraian Pengaduan	Jawaban / Tanggapan	Jenis Pengaduan	Status/ Tanggal
20.	15-11-2023 Pkl. 18:07 WIB	WAHYU ADHITYA	Tahun 2022 lalu Kepala Dinas Perindag Kota Baubau Meminta saya sebagai konsultan untuk membuat usulan teknis ke Kementerian Perindustrian RI terkait dengan Kegiatan PENGUATAN KEPASITAS KELEMBAGAAN SENTRA INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2023. Setelah usulan tersebut diterima dan dikerjakan mulai dari bulan April 2023 lalu, Saya dan beberapa rekan kerja selaku konsultan ditunjuk oleh Dinas Perindag Kota Baubau untuk menjadi pendamping IKM yang ada di Kota Baubau berdasarkan Surat Keputusan Dinas Perindag dengan Nominal Gaji yang tertera di SK tersebut, Namun sampai saat ini tanggal 15 November 2023 tidak ada kejelasan mengenai Hak Gaji yang kami terima dan ditambah Dana kegiatan yang menurut kami terindikasi ada permainan. padahal anggaran yang ada di kegiatan tersebut sebesar 2,7 Miliar Rupiah. untuk itu kami ingin melaporkan hal tersebut, dikarenakan kami tidak mau Dokumen dan Keahlian kami digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya. Kami merasa Dokumen dan Keahlian kami digunakan hanya untuk kepentingan pencairan anggaran. Namun tidak sampai kepada kami. Besar harapana kami laporan ini ditindak lanjuti. Terima Kasih	Memperhatikan Laporan Saudara mengenai belum dibayarnya hak gaji Saudara selaku konsultan pendamping IKM sebagaimana tertera dalam SK Disperindag Kota Baubau, sebaiknya ditanyakan permasalahannya kepada Kepala Dinas Perindag Kota Baubau. Apabila ada permasalahan dan indikasi yang mencurigakan agar dilaporkan ke Inspektorat Kota Baubau baik melalui website atau secara langsung/tertulis agar dapat ditindak lanjuti. Hal ini kami sampaikan karena Anggaran Kegiatan melalui DAK tercantum dalam DIPA Pemda Kota Baubau, untuk pelaksanaannya dilakukan oleh Disperindag Kota Baubau. Kementerian Perindustrian hanya menyetujui Kegiatan Teknis yang dusulkan apakah sudah sejalan dengan Program Kementerian Perindustrian dibidang IKM. Demikian trmkasih.	Pengaduan Masyarakat Lainnya	Selesai 16-11-2023
21.	20-11-2023 Pkl. 14:16 WIB		Assalamu\\'alaikum kak, mohon di tindaklanjuti tiket di lapor.go.id dengan nomor 7119004	Laporan Saudara kurang lengkap informasinya sehingga sulit untuk diidentifikasi. Ini adalah portal pengaduan masyarakat Kemenperin, mungkin materi pengaduan Saudara bukan kewenangan Kemenperin. Demikian terima kasih.	Pengaduan Masyarakat Lainnya	Selesai 21-11-2023

No	Tanggal Pengaduan	Pelapor/Alamat/ Pekerja	Uraian Pengaduan	Jawaban / Tanggapan	Jenis Pengaduan	Status/ Tanggal
22.	21-11-2023 Pkl. 10:33 WIB	Anonim	<p>Kepada yth.</p> <p>politeknik industri furnitur dan pengolahan kayu</p> <p>badan pengembangan sumber daya manusia</p> <p>industri</p> <p>kementerian perindustrian</p> <p>dengan hormat,</p> <p>selaku mahasiswa politeknik industri furnitur dan pengolahan kayu, ingin menyampaikan keluhan terkait kondisi ac di kampus.</p> <p>berdasarkan pengamatan, ac di beberapa ruangan kampus, terutama ruang kelas dan showroom b, tidak berfungsi dengan baik. hal ini menyebabkan ruangan menjadi panas dan pengap, terutama pada saat cuaca panas.</p> <p>kondisi ini dapat mengganggu kenyamanan dan kelancaran proses belajar mengajar. oleh karena itu, kami berharap agar pihak kampus dapat segera memperbaiki kondisi ac di kampus.</p> <p>demikian laporan ini kami sampaikan. Mohon jaga identitas pelapor ya kak, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih</p>	<p>Laporan Sdr tentang ketidak nyamanan proses belajar mengajar karena AC dibeberapa ruang kelas/showroom yang tidak berfungsi , akan kami sampaikan kepada Direktur Poltek Ind. Furnitur dan Pengolahan Kayu agar menjadi perhatian untuk ditindak lanjuti.</p> <p>Demikian trmkasih.</p>	Pengaduan Masyarakat Lainnya	Selesai 21-11-2023
23.	21-11-2023 Pkl. 20:44 WIB	Nohara	<p>Selamat pagi, Saya ingin melaporkan bahwa telah terjadi pelanggaran izin usaha industri oleh PT Autoliv Indonesia dimana PT Autoliv Indonesia yang bertempat di Kawasan MM2100 bekasi melakukan penjualan ilegal. Adapun detailnya sb :</p> <p>Izin usaha industri PT Autoliv Indonesia adalah manufatur alat keselamatan berkendara (seat belt kendaraan roda 4) kemudian seiring dengan permintaan pelanggan, PT Autoliv mengembangkan industrinya dengan membuat Airbag. Kemudian, disinilah pelanggaran dimulai. Air bag yang di produksi di PT Autoliv Indonesia ternyata tidak semua diproses di indonesia, melainkan diimport dari thailand kemudian dijual</p>	<p>Selamat pagi.</p> <p>Memperhatikan Laporan Pengaduan Sdr dapat kami sampaikan sebagai berikut :</p> <p>Perusahaan PT AUTOLIV yang memproduksi Seat belt kendaraan roda 4 dan produk Airbag adalah merupakan Perusahaan PMA (Status Investasi PMA), maka Penerbitan dan Pengendalian Perizinan perusahaan tersebut berada di Kementerian Investasi-BKPM, Untuk kasus ini sebaiknya dilaporkan ke Kementerian Investasi-BKPM melalui portal 'LAPOR' agar dapat di tindak lanjuti.</p> <p>Kementerian Prindustrian tidak</p>	Pengaduan Masyarakat Lainnya	Selesai 23-11-2023

No	Tanggal Pengaduan	Pelapor/Alamat/ Pekerj	Uraian Pengaduan	Jawaban / Tanggapan	Jenis Pengaduan	Status/ Tanggal
			<p>lagi ke OEM di indonesia. Berikut data airbag yang di produksi di PT Autoliv Indonesia: Passenger Air Bag = DAB Ini di assy di PT Autoliv Indonesia dan di jual ke PT MMKI Driver Air Bag = DAB Diimport dari Thailand kemudian dijual lagi ke PT MMKI Ini tidak ada proses apapun di PT Autoliv Indonesia hanya reacking saja. Untuk proses salah satu destinasi, malah tidak standart dimana seharusnya dipacking oleh karyawan bersertifikat (karena ini adalah berbahan DG / dangerous Goods) akan tetapi dipacking oleh karyawan kontrak biasa. Ada salah satu karyawan yang mempunyai sertifikat, akan tetapi tidak melakukan proses re-packing. INI sangat berbahaya. Jadi jika dilihat dari kegiatan industri PT Autoliv Indonesia tsb telah melanggar 2 ijin : Ijin usaha industri manufactur, akan tetapi melakukan usaha seperti forwarder / trading serta proses pengemasan product yang tidak standart SNI. Mohon untuk ditindaklanjuti.</p>	<p>berwenang menindaklanjuti, namun demikian laporan saudara kami sampaikan ke Ditjen ILMATE Kemenperin sebagai bahan masukan dalam rangka pembinaan Industri.</p> <p>Demikian terima kasih</p>		
24.	24-11-2023 Pkl. 00:20 WIB	Anonim	<p>Pegawai Kementerian Perindustrian penerima pendanaan studi (beasiswa) S3 an Jilly Ayuningtias pegawai dan mahasiswa S3 di SB IPB melakukan joki tugas akhir ke penyedia jasa Tjondroargo tandio dengan menggunakan paket lengkap mulai dari penulisan sampai dengan pengolahan data disertasi. Hal ini mencerminkan ketidakmampuan ybs dalam menjalankan studinya sehingga menghalalkan segala cara untuk lulus. Saat ini ybs masuk dalam tahap proposal, dan diduga kuat sudah mulai menggunakan joki tersebut.</p>	<p>Laporan Saudara kami sampaikan kepada unit terkait yaitu Sekretariat Ditjen KPAII untuk menjadikan perhatian . Demikian terima kasih.</p>	Pengaduan Masyarakat Lainnya	Selesai 27-11-2023

No	Tanggal Pengaduan	Pelapor/Alamat/ Pekerja	Uraian Pengaduan	Jawaban / Tanggapan	Jenis Pengaduan	Status/ Tanggal
25.	30-11-2023 Pkl. 12:24 WIB		<p>Ada Industri yang mencemari baik suara dan udara.</p> <p>King Sanitary nama perusahaannya</p> <p>Udara bau lem/epoxy</p> <p>Lokasi: Taman Rahayu 4. kab bandung margahayu</p>	<p>Laporan pengaduan tentang pencemaran lingkungan dari proses industri, agar dilaporkan ke website PPID Kab. Bandung portal "Pengaduan dan Pelanggaran" untuk dapat ditindak lanjuti oleh dinas yang berwenang di Pemda Kab. Bandung (Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan). Kementerian Perindustrian tidak berwenang menanganiinya.</p> <p>Demikian trmkasih.</p>	Pengaduan Masyarakat Lainnya	Selesai 27-11-2023
26.	03-12-2023 Pkl. 23:48 WIB	Mohamad Rifaldi Hapili	<p>Saya membeli hp Iphone Xr di Shope. Ternyata hp ini jenis eks inter, sehingga jaringannya terblokir, dan imei tidak terdaftar. Ini kesalahan saya dalam membeli, karena saya tidak tau kalau kondisi hp nya seperti ini.</p> <p>Saya sudah ke kantor Bea Cukai, dan Kominfo di Gorontalo, tapi mereka tidak bisa membantu. Mereka mengarahkan saya untuk melapor ke Kementerian Perindustrian..</p> <p>Jadi, apakah hp saya yg eks inter ini, masih bisa di daftarkan imeinya ? Atau harus ada jalan lain yg saya lakukan ?</p> <p>Saya melampirkan bukti Imei hp saya, yang telah diblokir. Mohon petunjuk dan informasinya</p>	<p>Terkait dengan laporan pengaduan Sdr dapat kami sampaikan bahwa, Kementerian Perindustrian hanya melayani pendaftaran IMEI dari produsen/pabrik, perusahaan importir terdaftar dan distributor resmi. Kementerian Perindustrian tidak melayani permohonan perorangan/pribadi. Sesuai ketentuan Kemenperin/Kemenkominfo, Iphone yang dibeli sebelum Agustus tahun 2019 tak langsung di blokir/ada pemutihan.</p> <p>Namun, untuk memastikan IMEI terdaftar atau tidak ada beberapa hal yang harus Saudara lakukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pastikan Pembelian hp tersebut dilakukan melalui official store atau tidak 2. Jika ya, maka Saudara dapat membawa hp saudara bersama nota pembelian dan kartu garansi ke official store tempat Saudara melakukan pembelian handphone 3. Lakukan pelaporan di official store 	Pengaduan Masyarakat Lainnya	Selesai 04-12-2023

No	Tanggal Pengaduan	Pelapor/Alamat/ Pekerj	Uraian Pengaduan	Jawaban / Tanggapan	Jenis Pengaduan	Status/ Tanggal
				tersebut jika IMEI tidak aktif 4. Official store akan memproses IMEI tersebut dan Saudara dapat menunggu untuk pengaktifan IMEI tersebut Demikian kami sampaikan, trmkasih.		
27.	05-12-2023 Pkl. 18:56 WIB	PT. HIDEA INTI DAYA	Pada 05 Oktober 2023, kami submit persyaratan ke OSS untuk mendapatkan sertifikat standar (ID Izin: I-202305261620226624189, ID Lokasi: L-202305261619288229704). 2 bulan berlalu, status permohonan kami : masih dalam verifikasi. Dan yang melakukan verifikasi adalah Kementerian Perindustrian. Mohon petunjuk, apa yang harus kami lakukan agar proses verifikasi bisa lebih cepat? Adakah dokumen lain yang harus kami submit?	Atas laporan Saudara untuk info bantuan teknis dan penjelasannya agar sebaiknya menghubungi : Email ppid.pusat @ kemenperin.go.id atau Email upp _ pusat@ kemenperin.go.id, WA UPP 0813.1997.6986 / Telp. 021.5255509 Ext.2737. Demikian trmkasih.	Pelayanan Masyarakat	Selesai 05-12-2023
28.	06-12-2023 Pkl. 10:41 WIB	Anastasya	Halo, nama saya Tasya dari PT Trimitra Usaha Sumber Daya. Saya ingin menanyakan beberapa hal mengenai kendala saya pada situs P3DN. No. sertifikat TKDN saya : 42/SJ-IND.8/E-TKDN/11/2023 Ada beberapa detail yang tidak terisi di situs P3DN, antara lain seperti Jenis Produk, Merk dan Tipe, Spesifikasi, Standard, Nilai TKDN Barang, Nilai TKDN Jasa, dan Nilai TKDN Gabungan. Bagaimana solusinya agar detail tersebut bisa terisi? Terima kasih	Sehubungan dengan laporan Sdr adalah bukan masalah pengaduan, maka sebaiknya disampaikan ke Email ppid_pusat@kemenperin.go.id agar selanjutnya dapat ditanggapi oleh unit Pusat P3DN. Demikian trmkasih.	Pengaduan Masyarakat Lainnya	Selesai 06-12-2023
29.	08-12-2023 Pkl. 13:22 WIB	Fikry Nurlia Fauziah	hp saya hilang mohon dibantu block imei Mohon dibantu baruu 2 jam yang lalu hilang nya pak	Berkenaan dengan laporan Saudara, dapat kami sampaikan bahwa Kementerian Perindustrian tidak berwenang/tidak bisa memblock IMEI pada HP yang hilang. Atas kejadian tersebut agar saudara lapor ke Kantor Polisi terdekat untuk mendapat Surat	Pengaduan Masyarakat Lainnya	Selesai 08-12-2023

No	Tanggal Pengaduan	Pelapor/Alamat/ Pekerj	Uraian Pengaduan	Jawaban / Tanggapan	Jenis Pengaduan	Status/ Tanggal
				Keterangan HP hilang, kemudian hubungi/kunjungi gerai operator penyedia jaringan dan beritahu nomor IMEI-Hp yang hilang. Biasanya pihak operator akan memberitahu lokasi HP yang hilang tersebut. Demikian trmkasih.		
30.	10-12-2023 Pkl. 14:19 WIB	Anonim	Haloo min, hp saya sudah seminggu belum muncul sinyal. Sudah regis di bea cukai soekarno kemarin, sudah coba hubungi kominfo kata nya bermasalah dengan kartu nya. Saya sudah coba pakai kartu yg lain bermacam2 tetap saja tidak bisa. Tolong ya di bantu.	Terkait dengan laporan Sdr dapat kami sampaikan bahwa, Kementerian Perindustrian hanya melayani pendaftaran IMEI dari produsen/pabrik, perusahaan importir terdaftar dan distributor resmi. Kementerian Perindustrian tidak melayani permohonan perorangan/pribadi. Demikian, trmkasih.	Pengaduan Masyarakat Lainnya	Selesai 11-12-2023
31.	12-12-2023 Pkl. 15:27 WIB	Anonim	Perkenalkan kami dari PT Millenio Amerta Data. Pada saat ini, kami sedang mengurus proses verifikasi Sertifikat Standar melalui SIINas dan OSS. Kami telah mengajukan permohonan verifikasi dengan ID berkas #11232639. Akan tetapi, proses tidak berjalan selama hampir 1 bulan. Status terakhir kami adalah \\\\\\"Menunggu disposisi Direktur\\\\\\\" dan tidak dijelaskan Direktorat pemroses itu siapa. Mohon bantuan informasi untuk proses kami ini dan kepada siapa kami dapat berkoordinasi, dikarenakan banyak hal yang terhambat karena proses verifikasi tidak berjalan/tidak kunjung selesai.	Berkenan atas laporan Saudara, untuk informasi proses bantuan teknis dan penjelasannya agar sebaiknya menghubungi : Email ppid_pusat @ kemenperin.go.id atau Email upp _pusat@ kemenperin.go.id, WA UPP 0813.1997.6986. atau langsung menghubungi Direktorat Ind. Elektronika dan Telematika Ditjen ILMATE. (Usaha PT. Milenio Amerta Data memproduksi, Soft ware) Demikian trmkasih.	Pelayanan Masyarakat	Selesai 12-12-2023

No	Tanggal Pengaduan	Pelapor/Alamat/ Pekerj	Uraian Pengaduan	Jawaban / Tanggapan	Jenis Pengaduan	Status/ Tanggal
32.	13-12-2023 Pkl. 08:52 WIB	Anonim	<p>Salam, kami dari PT Victory Utama Karya ingin mengajukan keluhan mengenai proses Verifikasi RK Besi/Baja (Industri) yang diproses oleh Direktorat Industri dan Logam. ID berkas yang kami ajukan adalah #11232481 dan sudah dikirim melalui SIINas pada tanggal 13 November 2023. Atas kebijaksanaan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, kami mohon agar keluhan dalam pesan ini segera ditindaklanjuti. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.</p>	<p>Laporan Saudara kami sampaikan kepada unit pemroses yaitu Dit. Industri Logam, Ditjen ILMATE, agar segera ditindaklanjuti. Demikian, terima kasih.</p>	Pelayanan Masyarakat	Selesai 13-12-2023
33.	19-12-2023 Pkl. 10:56 WIB	Rismul Trianto Salawali	<p>Assalamualaikum Wr Wb. Selamat Pagi Tim Rekrutmen PPPK Kementerian Perindustrian Tahun 2023.</p> <p>Perkenalkan saya peserta seleksi PPPK Formasi Khusus, Asisten Ahli-Dosen penempatan Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng. Melalui pesan elektronik ini, saya ingin menyampaikan sanggahan saya terhadap kelulusan administrasi salah satu peserta pendaftar formasi yang sama atas nama NURMALA SARI.</p> <p>Merujuk pada pengumuman Nomor. B/392/SJ-IND/KP/IX/2023 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023, pada poin 13.b tentang Kriteria Pelamar kebutuhan khusus tenaga Non ASN. Tenaga Non ASN yang dimaksud adalah pegawai yang melamar pada Instansi Pemerintah tempat pelamar masih Aktif bekerja saat mendaftar yakni Kementerian Perindustrian, dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 tahun secara terus menerus pada Kementerian Perindustrian.</p> <p>Berdasarkan data dukung yang saya himpun meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data pengumuman 	<p>Laporan Saudara kami sampaikan kepada Panitia Seleksi Penerimaan PPPK Kementerian Perindustrian/Biro OSDM Kemenperin tahun 2023, untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Demikian, terima kasih.</p>	Kepegawaian	Selesai 19-12-2023

No	Tanggal Pengaduan	Pelapor/Alamat/ Pekerja	Uraian Pengaduan	Jawaban / Tanggapan	Jenis Pengaduan	Status/ Tanggal
			<p>Nomor. B/554/SJ-IND/KP/X/2022 tentang Hasil Finalisasi Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2022. dari data tersebut tidak ditemukan Nama Tenaga Non ASN yang masih aktif bekerja atas nama NURMALA SARI.</p> <p>2. Hasil Penelusuran pada Pangkalan Data DIKTI menunjukkan bahwa yang bersangkutan saat ini merupakan Dosen tetap dengan status aktif pada Prodi Farmasi Universitas Mega Rezky Makassar. Pengecekan status dapat dilakukan pada Link berikut</p> <p>https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_dosen/NUEwMjRGRDctODAwNC00ODdELUJFOUetNUIwM0ZCQzVFNjRD</p> <p>Semoga data di atas dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tim seleksi dalam memeriksa dokumen dari yang bersangkutan.</p> <p>atas perhatiannya saya ucapan terima kasih.</p>			
34.	22-12-2023 Pkl. 09:23 WIB	Haris	<p>Kepada Yth Kementerian Perindustrian - ILMATE</p> <p>Kami adalah perusahaan pemilik API Umum yang memiliki PI Besi baja , Baja Paduan dan Produk turunannya yang telah expired pada bulan september tahun 2022 . dan yang kami import adalah jenis barang dalam klasifikasi produk turunannya .</p> <p>sampai saat ini kami belum bisa memproses Neraca Komoditas untuk proses pengajuan PI besi baja , di karenakan adanya Perubahan PP 28 tahun 2021 menjadi PP no 46 tahun 2023 yang sampai saat ini belum ada sosialisasi dan juga bisa berlaku bagi importir API U .</p>	<p>Laporan Saudara kami teruskan ke Ditjen ILMATE agar menjadi perhatian untuk ditindak lanjuti, dan sebaiknya juga melaporkan ke unit UPP no WA: 081319976986, email. upp_pusat@kemenperin.go.id atau masuk ke portal PPID Kemenperin yaitu Email ppid_pusat@kemenperin.go.id Demikian, terima kasih.</p>	Pelayanan Masyarakat	Selesai 22-12-2023

No	Tanggal Pengaduan	Pelapor/ Alamat/ Pekerj	Uraian Pengaduan	Jawaban / Tanggapan	Jenis Pengaduan	Status/ Tanggal
			<p>Kami sudah tidak Import dari oktober 2022 sampai dengan saat ini , dimana barang kami semua tertahan di negara asal Barang. Padahal Barang yang kami import adalah kebutuhan industri lokal yang sangat di butuhkan oleh Industri Lokal.</p> <p>Mohon Informasi dari Kementerian perindustrian - ILMATE, kapan kami bisa memulai dan melanjutkan proses Neraca Komoditas dan Memporoses PI Besi Baja Untuk Produk turunannya bagi API Umum . ?</p> <p>Dan Mohon Informasi kapan PERMENPERIN dari PP No 46 tahun 2023 bisa di terbitkan dan sosialisasinya ?</p> <p>Kami sangat berharap bisa segera mungkin melakukan import dan memproses PI Besi dan Baja untuk Produk turunannya , dikarenakan sudah lebih dari 1 tahun kami tidak bisa melakukan import untuk barang kami yang tertahan di negara asal barang .</p> <p>mohon informasi dan penjelasannya dari Kementerian Perindustrian - ILMATE .</p> <p>atas perhatiannya saya haturkan terima kasih . Haris</p>			

No	Tanggal Pengaduan	Pelapor/Alamat/ Pekerja	Uraian Pengaduan	Jawaban / Tanggapan	Jenis Pengaduan	Status/ Tanggal
35.	27-12-2023 Pkl. 12:35 WIB	HEINTJE TAHAPARIJ	BSPJI AMBON melakukan pengujian (gel strength) kekuatan gel karagenan (ATCC) dengan menggunakan METODE UJI ILEGAL dan agar terlihat LEGAL dicaplok no sni parameter lain.yang kalau terlihat oleh orang awam sangat meyakinkan.hal ini sudah saya laporan sebelumnya tetapi tidak ada tindak lanjut atas kerugian yang saya alami.mohon bantuannya agar kami yang dirugikan dipertemukan dengan BSPJI Ambon dalam sebuah forum,agar didengarkan keluhan kami.	Laporan Saudara kami sampaikan kepada unit terkait agar segera ditindaklanjuti. Demikian, terima kasih.	Pelayanan Masyarakat	Selesai 28-12-2023
36.	28-12-2023 Pkl. 11:56 WIB	Anonim	Kantor kami adalah outsourcing dan dibawah XL Axiata Tbk. Ada divisi WNA dimana jobdesc mereka adalah mendaftarkan nomor maupun IMEI. Beberapa minggu lalu sempat ada oknum counter yg menghubungi pihak kantor, menanyakan bahwa IMEI yang diregistrasi tiba2 terblokir. Ternyata orang-orang yg disebutkan diatas membuka jasa regitration IMEI Ilegal dengan harga 500k per IMEI. Pihak manager bimo seakan menutupi kasus ini karena ada kemungkinan dia terlibat, atasan kami yg lain sempat meminta cetak rek koran, dan ditemukan ada transferan sebesar 1 miliar dalam rekening sdri Ambarwati. Sedangkan untuk sdr. Sondang, sudah resign. Mohon diusut secara tuntas. Karena kantor menutupi kasus tsb.	Laporan Saudara belum memberikan informasi yang jelas, agar disebutkan apakah ada oknum pegawai Kementerian Perindustrian yang diduga terlibat dalam kasus yang Saudara lapor? Sdr. Bimo Junanto, Sondang dan Ambarwati (sebagaimana Sdr sebut) apakah pegawai XL Axiata Tbk ? apabila iya maka kasus tersebut bukan kewenangan Kementerian Perindustrian . Demikian, terima kasih.	Pengaduan Masyarakat Lainnya	Selesai 28-12-2023
37.	28-12-2023 Pkl. 13:13 WIB	HEINTJE TAHAPARIJ	Bukti penggunaan sni bodong pada laporan hasil uji YANG DIKELUARKAN dimana parameter (kekuatan gel) dan di situ di tulis pengujian menggunakan metode uji :SNI 01-2891-1992 ini adalah No Sni cara uji makanan minuman YANG TUDAK ADA HUBUNGANNYA DENGAN parameter yang di uji	Laporan Saudara kami sampaikan kepada unit terkait agar segera ditindaklanjuti. Demikian, terima kasih.	Pelayanan Masyarakat	Selesai 28-12-2023

No	Tanggal Pengaduan	Pelapor/ Alamat/ Pekerj	Uraian Pengaduan	Jawaban / Tanggapan	Jenis Pengaduan	Status/ Tanggal
38.	28-12-2023 Pkl. 13:25 WIB	HEINTJE TAHAPARIJ	Bukti alat yang di gunakan bspji ambon untuk menguji parameter kekuatan gel ATCC karagenan.YANG SANGAT JELAH MENGGUNAKAN INSTRUMEN DAN metode uji ILEGAL	Laporan Saudara kami sampaikan kepada unit terkait agar segera ditindaklanjuti. Demikian, terima kasih.	Pelayanan Masyarakat	Selesai 28-12-2023

INSPEKTORAT JENDERAL

No.	Indikator	Target	TW I		TW II		TW III		TW IV		Real. Fisik	Real. Keu	Capaian
			T	R	T	R	T	R	T	R			
1. SP.1 - Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian													
S1.1 - Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *) IKU	1,3 Persen	22%	14%	58%	40%	82%	64%	99%	76%	98%	100%	<u>0 Persen</u>	Tw1:0 Tw2:0 Tw3:0 Tw4:0
Pagu = Rp. 7.297.918.000 Realisasi = Rp. 7.283.314.609													
S1.2 - Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	90 Persen	15%	0%	32%	24%	47%	47%	58%	52%	52%	60%	<u>0 Persen</u>	Tw1:0 Tw2:0 Tw3:0 Tw4:0
Pagu = Rp. 325.218.000 Realisasi = Rp. 194.190.335													
S1.3 - Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	92 Persen	3%	0%	28%	18%	55%	43%	75%	50%	75%	75%	<u>72,2 Persen</u>	Tw1:72,2 Tw2:87,6 Tw3:0 Tw4:0
Pagu = Rp. 120.807.000 Realisasi = Rp. 90.540.740													
Total Pagu Sasaran = Rp. 7.743.943.000													
Total Realiasi Sasaran = Rp. 7.568.045.684 (97,7%)													
2. SP.2 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik													
S.2.1 - Nilai RB Area Penguatan Pengawasan	71 persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	<u>0 persen</u>	Tw1:0 Tw2:0 Tw3:0 Tw4:0
Pagu = Rp. 0 Realisasi = Rp. 0													
S2.2 - Indeks penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *) IKU	3 Level	5%	0%	10%	4%	16%	16%	25%	20%	21%	40%	<u>0 Level</u>	Tw1:0 Tw2:0 Tw3:0 Tw4:0
Pagu = Rp. 31.779.000 Realisasi = Rp. 12.703.153													
Total Pagu Sasaran = Rp. 31.779.000													
Total Realiasi Sasaran = Rp. 12.703.153 (40,0%)													
3. SP.3 - Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif													
S3.1 - Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	80 Persen	27%	14%	40%	40%	53%	53%	67%	60%	67%	65%	<u>0 Persen</u>	Tw1:0 Tw2:0 Tw3:0 Tw4:0
Pagu = Rp. 79.241.000 Realisasi = Rp. 51.859.141													
S3.2 - Capaian IACM Itjen	3 Level	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	99%	<u>0 Level</u>	Tw1:0 Tw2:0 Tw3:0 Tw4:0
Pagu = Rp. 30.700.000 Realisasi = Rp. 30.254.251													
S3.3 - Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	77 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	<u>0 Persen</u>	Tw1:0 Tw2:0 Tw3:0 Tw4:0
Pagu = Rp. 0 Realisasi = Rp. 0													
Total Pagu Sasaran = Rp. 109.941.000													
Total Realiasi Sasaran = Rp. 82.113.392 (74,7%)													
4. SP.4 - Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri													
S4.1 - Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal *) IKU	80 Persen	16%	15%	33%	30%	50%	43%	56%	43%	43%	67%	<u>0 Persen</u>	Tw1:0 Tw2:0

Tw3:0
Tw4:0

Pagu = Rp. 446.250.000
Realisasi = Rp. 297.424.047

Total Pagu Sasaran = Rp. 446.250.000

Total Realiasi Sasaran = Rp. 297.424.047 (66,6%)

5. SP.5 - Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif

SS5.1 - Efektivitas Regulasi yang ditetapkan di Lingkungan Inspektorat Jenderal	76 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0 Persen
---	-----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	------	--------------------------

Tw1:0
Tw2:0
Tw3:0
Tw4:0

Pagu = Rp. 62.206.000
Realisasi = Rp. 62.048.993

Total Pagu Sasaran = Rp. 62.206.000

Total Realiasi Sasaran = Rp. 62.048.993 (99,7%)

6. SP.6 - Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel

SP6.1 - Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78,4 Nilai	21%	2%	59%	2%	72%	2%	75%	2%	75%	100%	0 Nilai
---	------------	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	------	-------------------------

Tw1:0
Tw2:0
Tw3:0
Tw4:0

Pagu = Rp. 5.200.000
Realisasi = Rp. 5.182.000

Total Pagu Sasaran = Rp. 5.200.000

Total Realiasi Sasaran = Rp. 5.182.000 (99,7%)

7. SP.7 - Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

SP7.1 - Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	90 Persen	41%	43%	58%	63%	83%	84%	100%	100%	100%	100%	0 Persen
---	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	--------------------------

Tw1:0
Tw2:0
Tw3:0
Tw4:0

Pagu = Rp. 89.938.000
Realisasi = Rp. 89.822.590

SP7.2 - Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100 Persen	28%	28%	35%	40%	68%	83%	100%	100%	100%	99%	0 Persen
--	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	-----	--------------------------

Tw1:0
Tw2:0
Tw3:0
Tw4:0

Pagu = Rp. 534.149.000
Realisasi = Rp. 528.527.018

SP7.3 - Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	72 Persen	8%	0%	12%	0%	17%	0%	22%	0%	17%	100%	0 Persen
--	-----------	----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	------	--------------------------

Tw1:0
Tw2:0
Tw3:0
Tw4:0

Pagu = Rp. 11.122.604.000
Realisasi = Rp. 11.113.281.539

SP7.4 - Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Inspektorat Jenderal	92 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0 Persen
---	-----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--------------------------

Tw1:0
Tw2:0
Tw3:0
Tw4:0

Pagu = Rp. 0
Realisasi = Rp. 0

SP7.5 - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	74,5 Nilai	25%	7%	50%	7%	75%	7%	100%	7%	97%	100%	0 Nilai
--	------------	-----	----	-----	----	-----	----	------	----	-----	------	-------------------------

Tw1:0
Tw2:0
Tw3:0
Tw4:0

Pagu = Rp. 10.000.000
Realisasi = Rp. 9.982.179

Total Pagu Sasaran = Rp. 11.756.691.000

Total Realiasi Sasaran = Rp. 11.741.613.326 (99,9%)

8. SP.8 - Terwujudnya APIP yang Profesional dan Berintegritas

SP8.1 - Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	73 Indeks	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0 Indeks
---	-----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--------------------------

Tw1:0
Tw2:0

Pagu = Rp. 0															Tw3:0
Realisasi = Rp. 0															Tw4:0
SP8.2 - Sharing Knowledge atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	65 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	<u>0 Persen</u>	Tw1:0	
Pagu = Rp. 18.000.000															Tw2:0
Realisasi = Rp. 18.000.000															Tw3:0
SP8.3 - Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	76 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	<u>0 Persen</u>	Tw4:0	
Pagu = Rp. 462.676.000															Tw1:0
Realisasi = Rp. 462.656.138															Tw2:0
Total Pagu Sasaran = Rp. 480.676.000															Tw3:0
Total Realiasi Sasaran = Rp. 480.656.138 (100,0%)															Tw4:0

9. SP.9 - Gaji dan Tunjangan

SP.9.1 - Gaji dan Tunjangan	12 layanan	25%	8%	50%	8%	75%	8%	100%	8%	93%	98%	<u>0 layanan</u>	Tw1:0
Pagu = Rp. 17.150.698.000													Tw2:0
Realisasi = Rp. 16.808.884.589													Tw3:0

Total Pagu Sasaran = Rp. 17.150.698.000

Total Realiasi Sasaran = Rp. 16.808.884.589 (98,0%)

Total	Rp. 37.787.384.000
Realisasi	Rp. 37.058.671.322 (98,1%)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	182	019	247885	INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	Nilai	100.00	69.23	97.81	100.00	100.00	99.82	100.00	100.00	96.47	100%	96.47
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	6.92	19.56	10.00	10.00	9.98	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	84.62		99.53					100.00			

REKAPITULASI NILAI IPASN
Inspektorat Jenderal
Tahun 2022

Tanggal update : **2023-12-19****12345678910112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646:**

No.	NIP	Nama	Jenis Jabatan	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
1.	196408071991101001	Wawas Swathatafrijah		23	15	25	5	68
2.	198002142006041003	Y.L. Didid Kristiawan		20	25	25	5	75
3.	196603021987101001	Sutarno		20	18	25	5	68
4.	197104102009101001	Augus Napitupulu		20	18	25	5	68
5.	197610052010012011	Yonita Anggrainy		22	18	25	5	70
6.	197803232014061001	Irman Setiyadi		22	18	25	5	70
7.	198009102014061001	Wawan Setiawan		20	18	25	5	68
8.	198401022014081001	Munawir		21	18	25	5	69
9.	198611282020122001	Novi Fitriyanti		21	18	25	5	69
10.	198812312010122001	Rosiana Taruni		22	18	25	5	70
11.	199001292020121001	Hendri Dhyan Sulistya Nugraha		21	10	25	5	61
12.	199004212014022001	Ira Sukmayanti		22	18	25	5	70
13.	199010182019011001	Jaenudin Sukrilah		22	23	25	5	75
14.	199012072019012001	Ratih Putri Antini		23	23	25	5	76
15.	199210222015021001	Ferdi Surya Pradana		22	18	25	5	70
16.	199304122019012001	Aruma Keicha Chandritia		22	18	25	5	70
17.	199612012020122004	Safita Ema Amalia		22	18	25	5	70
18.	199612282020121002	Aditya Ngesti Utomo		21	0	25	5	51
19.	199702242018121002	Bagas Unggul Yudanta		21	0	25	5	51
20.	199708212019122001	Farha Maulidia		21	18	25	5	69
21.	199710072020122001	Zulva Siti Nurjanah		21	18	25	5	69
22.	199712302018122001	Desita Prihapsari		21	0	25	5	51
23.	199811022019121001	Fernando Noverian Juve Vieri Rahman		21	18	25	5	69
24.	199910222021011003	Yazid Abdurrohman Aunillah		21	21	25	5	72
25.	196409291990032007	Ismiyati		20	25	25	5	75
26.	196712081990031003	Heri Purnomo		20	10	25	5	60
27.	197708192001122001	Fitriah A Somad		23	40	25	5	93
28.	197807172002121006	Herry Rusli Kuncoro		23	15	25	5	68
29.	198111012006042003	Hilma		23	30	25	5	83
30.	198307252009112001	Rika Betty Nurindah Rustiawati		23	25	25	5	78
31.	198406142009012005	Nirna Fitri Yunahar		23	15	25	5	68
32.	197901312003121001	Bayu Fajar Nugroho		23	15	25	5	68
33.	198203032010011024	Ratno Adi Hartanto		21	25	25	5	76
34.	195812121980031005	Edy Waspan		23	10	25	5	63
35.	197407302005022001	Kesumaning Hastuti		20	30	25	5	80
36.	198104242008031001	Afrizal Haris		23	30	25	5	83

No.	NIP	Nama	Jenis Jabatan	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
37.	198110132009011006	Oktaviyanto Jimat Wibowo		23	30	25	5	83
38.	198304062009111001	Hariadi Amri		20	25	25	5	75
39.	198306232008031003	Mokhammad Subuh Washardito		20	15	25	5	65
40.	198405222009111001	Mohammad Adhi Rachmaidi		23	15	25	5	68
41.	198504252010121001	Rizki Aviandri		23	25	25	5	78
42.	198509162010011008	Rachmat Muhbianto		23	30	25	5	83
43.	198601212014022001	Noer Kristia Lestari Sitepu		22	15	25	5	67
44.	198904092015021001	Hary Apriyandi Mulia Romadhon		22	15	25	5	67
45.	198907072015022002	Dinavita Rizkyanti		22	30	25	5	82
46.	198909172014022001	Arantxa Tiar		22	15	25	5	67
47.	199008112018011001	Aditya Gamma Mesakh S		22	10	25	5	62
48.	199502052019032017	Noer Dwi Rizkia Putri		22	30	25	5	82
49.	196401071989031002	R. Janu Suryanto		23	25	25	5	78
50.	197405052008042001	Risniarti		23	10	25	5	63
51.	198506222020121001	Andy Sebastian Tanasha		22	18	25	5	70
52.	196105151981031002	Ali Joto Manalu		23	25	25	5	78
53.	198301062009111001	Denny Chandra Arifin		23	10	25	5	63
54.	198304252008031001	Rizki Perdana		20	40	30	5	95
55.	198309082009112001	Zita Tessa Rahayani		23	25	25	5	78
56.	198311132008031002	Riko Lesmana Oetarman		23	25	0	5	53
57.	198401242009111001	Dwi Harjanto		20	40	25	5	90
58.	198611222010121002	Indra Irwan		22	40	25	5	92
59.	198712302009111002	Agung Tri Utomo		23	25	25	5	78
60.	198811192014022001	Dian Novita Sari		23	10	25	5	63
61.	198811232014021001	Noa Salfhali		22	25	25	5	77
62.	199001222019012001	Elizabeth Frycillya Aritonang		22	40	25	5	92
63.	199201162014021001	Yansen Aditya Sembiring		22	40	25	5	92
64.	199404262018011001	Azka Rianto Tedja Ningrat		22	10	25	5	62
65.	198402152009112001	Dyan Garneta Paramita Sari		23	0	25	5	53
66.	197006301991031003	Solihin		22	18	25	5	70
67.	198112202009112002	Desmy Fitra		21	25	25	5	76
68.	196707261989031002	Suwarta		20	40	25	5	90
69.	197404132005021001	Edwin Darmawan		23	30	25	5	83
70.	197807122008031001	Giry Rachman		20	15	25	5	65
71.	197904252009011004	Ridja Muda Utama		20	25	25	5	75
72.	198007222008031001	Tjahyono		20	30	25	5	80
73.	198309102009011005	Indra Laksmana		20	30	25	5	80
74.	198605262014022001	Glory Meynar Manjadi Hamongan Sid		22	30	30	5	87

No.	NIP	Nama	Jenis Jabatan	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
75.	198703032009012004	Ciendy Martha Gayatri		20	15	30	5	70
76.	198706242018011002	Zaky Al Afkar		23	30	30	5	88
77.	198805282010122001	Armanita Kusumaningrum		23	25	25	5	78
78.	198908242014022001	Atik Rindarsih		23	10	25	5	63
79.	199007142014022001	Ayu Budiaarti		22	15	25	5	67
80.	1990111212014022001	Paramitha Susilo Budi Utari		22	15	25	5	67
81.	199208172018011001	Prasetyo Putra Mahardika		22	30	25	5	82
82.	199308222020121002	Sumaryono		22	15	25	5	67
83.	196803021994032006	Sri Hastuti Nawantingsih		23	30	30	5	88
84.	196707122014061001	Riyadi		20	18	25	5	68
85.	198011132009111001	Zuan Andri Wijayanto		23	0	25	5	53
86.	198905052014021002	Muhamad Luthfi		22	23	25	5	75
87.	197809092006042002	Jelita Berlinia		23	15	25	5	68
88.	197810302009011004	Abu Naim Toyib		20	25	30	5	80
89.	198201062008031003	Wuryanto		20	30	25	5	80
90.	198207132009012003	Tiurma Juliani Pardede		23	30	25	5	83
91.	198502152019011001	Gun Gun Gumilar Nurul Zatnika		23	30	30	5	88
92.	198504242009112001	Trinanti Sulamit		23	30	25	5	83
93.	198606092010122006	Farida Nurfitriana		20	15	25	5	65
94.	198606112009111001	Alexander Hamongan Nainggolan		23	15	30	5	73
95.	198606292014022002	Pratiwi Widiyastuti		22	15	25	5	67
96.	198701202010121002	Rayersad Saesar A.		23	30	30	5	88
97.	198907082014021001	Galih Tri Purnomo		22	30	25	5	82
98.	199305032018011001	Akhmad Faiq Nashrullah		22	15	25	5	67
Rata-rata				21,81	21,11	25,20	5,00	73,12

**REKAPITULASI PERSENTASE APIP YANG MENDAPATKAN DIKLAT KOMPETENSI/PROFESI SESUAI RENCANA
KEBUTUHAN DIKLAT S.D. TW IV**

No.	Nama	Keikutsertaan Diklat s.d. TW IV	Jumlah diklat
1	M. Subuh Washardito, SE., CGAA	Certification Of Government Accounting Expert (CGAE) Level 2 Batch 2 Pelatihan Penerimaan Negara Bukan Pajak Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
2	Jelita Berlinia, SE, MM	Audit Pengadaan Barang dan Jasa Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
3	Rayersad Saeser A., ST , M.S.E	Audit Pengadaan Barang dan Jasa Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
4	Tiurma Juliani Pardede, SE, M.Ak	Audit Pengadaan Barang dan Jasa Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
5	Abu Naim Toyib, SE	Audit Pengadaan Barang dan Jasa Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
6	Hilma, S.E, M.Ak	Audit Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan APIP Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
7	Wuryanto, ST	Audit Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan APIP Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Madya di Lingkungan APIP Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
8	Ciendy Martha Gayatri, ST	Audit Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan APIP Pelatihan Penerimaan Negara Bukan Pajak Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
9	Dwi Harjanto, ST	Probit Audit Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan APIP Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
10	Giry Rachman, S.Kom	Probit Audit Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan APIP Pelatihan Penerimaan Negara Bukan Pajak Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1

11	Atik Rindarsih, SE	Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan K/L Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Muda di Lingkungan APIP Pelatihan Penerimaan Negara Bukan Pajak Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
12	Sumaryono,S.T.	Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan K/L Pelatihan Penerimaan Negara Bukan Pajak Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
13	Tjahyono, SE	Audit PKKN dan Pemberian Keterangan Ahli di Lingkungan APIP Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Madya di Lingkungan APIP Pelatihan Penerimaan Negara Bukan Pajak Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
14	Trinanti Sulamit, S.I.Kom., M. Ak.	Audit PKKN dan Pemberian Keterangan Ahli di Lingkungan APIP Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Madya di Lingkungan APIP Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
15	Rizki Perdana, SE, MT	Pelatihan Reviu Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
16	Y.L. Didid Kristiawan, ST.	Pelatihan CROP dan Ujian CROP Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
17	Rika Betty Nurindah Rustiawati, S.Si., M. Se	Pelatihan CROP dan Ujian CROP Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
18	Aruma Keicha Chandritia, SE	Pelatihan CROP dan Ujian CROP Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
19	Ratih Putri Antini, S.A.P.	Pelatihan CROP dan Ujian CROP Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
20	Jaenudin Sukrilah, S.M.	Pelatihan CROP dan Ujian CROP Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1

21	Elizabeth Frycillya Aritonang, S.T.	Conference IIA 2023 Batam Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
22	Indra Laksmana, S.T.P., CGAP	Conference IIA 2023 Batam Pelatihan Penerimaan Negara Bukan Pajak Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
23	Pratiwi Widiyastuti, S.T	Conference IIA 2023 Batam Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Muda di Lingkungan APIP Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
24	Gun Gun Gumilar N. Zatnika, SST	Conference IIA 2023 Batam Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
25	Galih Tri Purnomo, SE	Conference IIA 2023 Batam Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Muda di Lingkungan APIP Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
26	Dinavita Rizkyanti, SE	Conference IIA 2023 Batam Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Muda di Lingkungan APIP Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
27	Paramitha Susilo Budi Utari, S.T	Audit Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan APIP Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Muda di Lingkungan APIP Pelatihan Penerimaan Negara Bukan Pajak Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
28	Zaky Al Afkar, S.T.	Audit Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan APIP Pelatihan Penerimaan Negara Bukan Pajak Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1

29	Arantxa Tiar, SE	Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Muda di Lingkungan APIP Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
30	Noer Kristia Lestari Sitepu, SH	Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Muda di Lingkungan APIP Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
31	Noa Salfhali, ST	Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Muda di Lingkungan APIP Pelatihan Penerimaan Negara Bukan Pajak Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
32	Yansen Aditya Sembiring, SH	Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Muda di Lingkungan APIP Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
33	Glory Meynar Manjadi Hamonangan Sidjabat, S.H	Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Muda di Lingkungan APIP Pelatihan Penerimaan Negara Bukan Pajak Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
34	Ayu Budiarti, SE	Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Muda di Lingkungan APIP Pelatihan Penerimaan Negara Bukan Pajak Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
35	Kesumaning Hastuti, SMI	Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Madya di Lingkungan APIP Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
36	Oktaviyanto Jimat Wibowo, ST, MT, MBA	Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Madya di Lingkungan APIP Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
37	Denny Chandra, S.Kom, MM	Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Madya di Lingkungan APIP Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
38	Dian Novita Sari, ST	Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Muda di Lingkungan APIP Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
39	Rachmat Muhbianto, S.Pt, MM	Pelatihan Penerimaan Negara Bukan Pajak Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1

40	Armanita Kusumaningrum, SE, MSE	Pelatihan Penerimaan Negara Bukan Pajak Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
41	Suwarta, SE	Pelatihan Penerimaan Negara Bukan Pajak Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
42	Prasetyo Putra Mahardika, S.T.	Pelatihan Penerimaan Negara Bukan Pajak Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
43	Ridja Muda Utama, SE	Pelatihan Penerimaan Negara Bukan Pajak Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
44	Mohammad Adhi Rachmaidi, S.T., M.S.E.	Pelatihan Penerimaan Negara Bukan Pajak Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
45	Rizki Aviandri, S.T., M.T., M.B.A.	Pelatihan Penerimaan Negara Bukan Pajak Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
46	Hary Apriyandi Mulia Romadhon, S.E	Pelatihan Penerimaan Negara Bukan Pajak Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
47	Noer Dwi Rizkia Putri, S.T.	Pelatihan Penerimaan Negara Bukan Pajak Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
48	Aditya Gamma Mesakh S, S.T.	Pelatihan Penerimaan Negara Bukan Pajak Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
49	Zita Tessa Rahayani, SE, MPA	Pelatihan Penerimaan Negara Bukan Pajak Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
50	Edwin Darmawan, S.Kom, MM	Pelatihan Penerimaan Negara Bukan Pajak Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
51	Muhamad Luthfi	Pelatihan Penerimaan Negara Bukan Pajak Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
52	Irman Setiyadi, S.E.	Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi PBJ Level-1 Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
53	Dr M. Rum, S.H.,M.H.	Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
54	Drs. Wawas Swathatafrijah, M.Sc., QIA., CGCAE	Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
55	Herry Rusli Kuncoro, SE, M.Si	Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1

56	Heri Purnomo, ST	Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
57	Fitriah A. Somad, ST., M.Eng.	Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
58	Nirna Fitri Yunahar, SE.Ak, M.Ak	Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
59	Ferdi Surya Pradana, S.Kom	Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
60	Yonita Anggrainy, SAP	Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
61	Ira Sukmayanti, SE	Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
62	Sutarno	Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
63	Rosiana Taruni, A.Md, S.Ak.	Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
64	Munawir	Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
65	Augus Napitupulu	Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
66	Wawan Setiawan	Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
67	Fernando Noverian Juve Vieri Rahmanto, A.Md.Ak.	Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
68	Farha Maulidia, A.Md.Ak.	Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
69	Hendri Dhyan Sulisty Nugraha, A.Md.	Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
70	Novi Fitriyanti, A,Md	Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
71	Aditya Ngesti Utomo, A.Md.	Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
72	Zulva Siti Nurjanah, A.md	Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
73	Safita Ema Amalia, S.Si	Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
74	Yazid Abdurrohman Aunillah, A.Md.,Ak.	Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
75	Daniel Victor Tumbur Marnala, S.E.	Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
76	Reditya Filza Priatama, S.A.P.	Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
77	Ryan Septio, S.Tr.Kom	Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
78	Bayu Fajar Nugroho, ST, MPP	Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1

79	Drs. Edy Waspan, MM	Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
80	Afrizal Haris, ST, MT, CFRA, CRMO, CPRM.	Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
81	Hariadi Amri, SH	Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
82	Yon Handika Siregar, S.T.	Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
83	Ratno Adi Hartanto, SH	Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
84	Ir. R. Janu Suryanto, ME	Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
85	Drs. Ali Joto Manalu., MM	Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
86	Riko Lesmana Oetarman, SH., M.Kn	Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
87	Agung Tri Utomo, SE	Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
88	Indra Irwan, S.AP	Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
89	Gian Adhi Darmawan, S.Hut	Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
90	Risniarti, SST., MM	Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
91	Andy Sebastian Tanasha, S.Kom	Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
92	Dyan Garneta Paramita Sari, S.T.P., M.Sc, CGAP, CIA.	Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
93	Solihin, SE	Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
94	Alexander Hamongan N., SIP, M.Sc	Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
95	Akhmad Faiq Nashrullah, ST	Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
96	Afriyanto Yanuarista Pratomo, S.T.	Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
97	Mochammad Iqbal Ardi Wibowo, S.T.P	Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
98	Zuan Andri Wijayanto, SE, MT, MBA	Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
99	Riyadi	Workshop Public Speaking (Capacity Building 2023)	1
Total Pegawai yang Diklat			99

Total Pegawai	108 Orang
Pegawai TB	3 Orang
Pegawai Cuti Melahirkan	2 Orang
Total Pegawai aktif	103 Orang
Presentasi APIP yg memperoleh Diklat Teknis s.d. TW IV	96,12

Target	77
Realisasi	96,12
Realisasi melebihi Target	

NB:

Keikutsertaan APIP pada diklat kompetensi/profesi sesuai dengan rencana kebutuhan diklat
Presentase yang diharapkan di Tahun 2023 adalah 77%

**REKAPITULASI KEGIATAN SHARING KNOWLEDGE ATAS KEIKUTSERTAAN DIKLAT SUBSTANSI PENGAWASAN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2023**

No.	JENIS PELATIHAN	INSTANSI PENYELENGGARA	WAKTU PELAKSANAAN	Narasumber	KETERANGAN
1	Audit Pengadaan Barang dan Jasa	Inspektorat Jenderal	04 Maret 2023	1. Jelita Berlinia 2. Tiurma 3. Rayersad Saesar 4. Abu Naim Toyib	
2	Audit Pengadaan Barang dan Jasa	Inspektorat Jenderal	08 Juli 2023	1. Hilma 2. Wuryantoro	
3	Audit Pengadaan Barang dan Jasa	Inspektorat Jenderal	19 Juli 2023	Ciendy Martha	
4	Audit Pengadaan Barang dan Jasa	Inspektorat Jenderal	06 Oktober 2023	1. Zaky Al Afkar 2. Paramitha	
5	Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan K/L	Inspektorat Jenderal	29 Juli 2023	1. Atik Rindarsih 2. Sumaryono	
6	Audit PKNN dan Pemberian Keterangan Ahli di Lingkungan APIP	Inspektorat Jenderal	5 Agustus 2023	1. Tjahyono 2. Trinanti Sulamit	
7	Pelatihan Reviu Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga	Inspektorat Jenderal	10 September 2023	Rizki Perdana	
8	Pelatihan CROP	Inspektorat Jenderal	29 September 2023	1. Y.L Didid 2. Rika Betty 3. Aruma Keicha 4. Ratih Putri 5. Jaenudin	
9	Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Muda di Lingkungan APIP	Inspektorat Jenderal	3 November 2023	1. Arantxa Tiar 2. Noer Kristia Lestari Sitepu 3. Noa Salfhali 4. Yansen Aditya Sembiring 5. Atik Rindarsih 6. Glory Meynar Manjadi Hamongan Sidjabat 7. Ayu Budianti 8. Paramitha Susilo Budi Utari 9. Pratiwi Widayastuti 10. Galih Tri Purnomo	
10	Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Muda di Lingkungan APIP	Inspektorat Jenderal	18 November 2023	1. Dinavita Rizkyanti 2. Dian Novita Sari	
11	Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Madya di Lingkungan APIP	Inspektorat Jenderal	10 November 2023	Tjahyono	
12	Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Madya di Lingkungan APIP	Inspektorat Jenderal	10 November 2023	1. Kesumaning Hastuti 2. Oktaviyanto Jimat W 3. Denny Chandra Arifin 4. Wuryantoro 5. Trinanti Sulamit	
13	Bimbingan Teknis PBJ Level 1	Inspektorat Jenderal	10 Desember 2023	Irmans Setiyadi	
PRESENTASE					76%

NB: Kegiatan Sharing Knowledge atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan
Presentase yang diharapkan di Tahun 2023 adalah 70%

Target	70%
Realisasi	0,76
Realisasi melebihi Target	